



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 900/ 5946 /415.44/2022
188/ 15 /Pimp.DPRD/415.14/2022

TANGGAL : 11 Agustus 2022

**TENTANG
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 900/ 5946 /415.44/2022
188/ 15 /Pimp.DPRD/415.14/2022

TANGGAL : 11 Agustus 2022

**TENTANG
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. MUNDJIDAH WAHAB
Jabatan : Bupati Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang
2. a. N a m a : H. MAS'UD ZUREMI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- b. N a m a : DONNY ANGGUN, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- c. N a m a : FARID AL FARISI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- d. N a m a : ARIF SUTIKNO, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Jombang, 11 Agustus 2022

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

**BUPATI JOMBANG**
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. MUNDJIDAH WAHAB

**KABUPATEN JOMBANG**
Selaku
PIHAK KEDUA

H. MAS'UD ZUREMI

KETUA

DONNY ANGGUN, S.Sos

WAKIL KETUA


FARID AL FARISI

WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	6
RENCANA PENERIMAAN DAERAH	6
2.1. Target Pendapatan Daerah	6
2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah	6
BAB III	8
PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	8
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	21
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah.....	34
3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	50
BAB IV	51
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	51
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.	51
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	52
BAB V	53
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	53
BAB VI	55
PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.	7
Tabel 3. 1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	9
Tabel 3. 2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	22
Tabel 3. 3	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	35
Tabel 3. 4	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja.....	50
Tabel 4. 1	Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	51
Tabel 4. 2	Plafon anggaran sementara berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023	52
Tabel 5. 1	Rincian Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses penyusunan APBD tidak lepas dari beberapa tahapan yang mendahului, yaitu penyusunan dokumen RKPD, dokumen KUA, dan dokumen PPAS. Pada pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. PPAS merupakan dokumen penting dalam rangkaian penyusunan APBD suatu daerah karena pada dokumen inilah skala prioritas pembangunan daerah ditentukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Peraturan perundang-undangan yang sama juga mengamanatkan dalam menyusun rancangan PPAS pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyusun skala prioritas pembangunan daerah. Tujuan penyusunan prioritas pembangunan daerah adalah untuk memberikan arahan yang jelas terhadap pembangunan agar seluruh sumber daya difokuskan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah sehingga dengan keterbatasan dana yang dimiliki, pembangunan daerah dapat menyentuh tujuan utama dari pemerintah daerah sehingga pada saat pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan kepala daerah dapat diukur apakah visi dan misinya dapat tercapai selama lima tahun masa kepemimpinannya.

Setelah menentukan skala prioritas pembangunan daerah, beberapa tahapan yang harus disusun dalam rancangan PPAS yaitu menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun; dan menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam penganggaran

daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah Kebijakan Umum APBD.

Penyusunan PPAS Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan PPAS kepada DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara Bupati Jombang dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 akan lebih efektif.

1.2. Tujuan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai dokumen sementara memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program/kegiatan. PPAS Kabupaten Jombang disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai pedoman dan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta rencana pembiayaan;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 327-13/2017);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 219-7/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1/B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 84-4/2020);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 234-8/2021);
 26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E);
 27. Peraturan Bupati Jombang No. 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 54/E);
 28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 29/E).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besar penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. PAD bergantung pada kondisi ekonomi regional. Kondisi ekonomi daerah dapat diukur dari perkembangan PDRB, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang diperkirakan tumbuh sebesar 3,95%-4,05%.

Dalam struktur APBD Kabupaten Jombang sampai saat ini masih mengandalkan pada alokasi dana transfer dari Pemerintah terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian, proyeksi pendapatan daerah sangat tergantung terhadap gambaran ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional akan mempengaruhi alokasi anggaran, utamanya dana transfer ke daerah dan arah pembangunan di daerah.

2.1. Target Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas realisasi pendapatan daerah dalam 3 tahun terakhir, serta dengan mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah hingga semester I Tahun 2022. Dengan realisasi yang ada dan dengan kebijakan yang diambil untuk P-APBD Tahun Anggaran 2022, pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.124.356.478.938,00.

2.2. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.232.515.046.776,00 yang berasal dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.212.515.046.776,00 dan proyeksi penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00. Besaran proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tersebut telah didasarkan pada realisasi Tahun 2021 dan berbagai kebijakan pada P-APBD Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan asumsi kondisi perekonomian serta kebijakan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam dokumen KUA Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023, maka rincian rencana penerimaan daerah dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel 2.1 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	534.586.872.444	
4.1.01	Pajak daerah	147.822.650.000	Perda Kab. Jombang No. 1 Tahun 2020
4.1.02	Retribusi daerah	19.502.366.273	Perda Kab. Jombang No. 2 Tahun 2020 Perda Kab. Jombang No. 5 Tahun 2020 Perda Kab. Jombang No. 6 Tahun 2020
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.218.264.401	Proyeksi
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	362.043.591.770	Proyeksi
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.589.769.606.494	
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.418.319.606.494	Proyeksi didasarkan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2021
4.2.02	Transfer Antar Daerah	171.450.000.000	Proyeksi didasarkan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	
4.3.01	Hibah	-	Proyeksi
4.3.02	Dana Darurat		Proyeksi
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Proyeksi
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.124.356.478.938	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	212.515.046.776	Proyeksi
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		Proyeksi
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		Proyeksi
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	20.000.000.000	Proyeksi
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		Proyeksi
6.1.06	Penerimaan piutang daerah		Proyeksi
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	232.515.046.776	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.356.871.525.714	

Sumber : BPKAD Tahun 2022

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan Tahun 2023, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa-Bali yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah:

1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk yang berorientasi ekspor;
2. Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah Jawa bagian selatan dan Bali bagian Utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
4. Meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan mitigasi bencana.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 ditetapkan dengan menyelaraskan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 serta dengan mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023. Sinkronisasi dimulai dari penentuan tema pembangunan Kabupaten Jombang yang disesuaikan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RKPD Provinsi Jawa Timur serta disesuaikan dengan tema pembangunan nasional yang terdapat dalam RKP Tahun 2023.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dirangkum ke dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
1	Prioritas VII : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	Semua Perangkat Daerah	
			Nilai Penilaian Mandiri SPBE	Sekretariat Daerah	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kategori sangat tinggi.		
			Persentase peningkatan Inovasi Daerah		
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD		
			Persentase Capaian Kinerja Program RKPD dengan Kategori Tinggi		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	BPKAD	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
			Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja OPD		
			Tingkat ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban APBD		
			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD		
		Tingkat Ketetapan waktu penyampaian LKPD ke BPK			
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase unit kearsipan yang menjamin keselamatan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai (APIP Dan BPK)	Inspektorat			

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	Inspektorat	
			Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Dan Penyusunan Perundang - Undangan	Sekretariat Daerah	
			Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat		
			Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan		
			Nilai LPPD		
			Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Di Tetapkan Tepat Waktu		
			Persentase Kebijakan Bidang Tata Pemerintahan Yang Ditetapkan		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Tepat Waktu Sesuai Sop	DPM PTSP	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dihasilkan	DPM PTSP	
			Persentase layanan Perizinan yang tepat waktu sesuai SOP		
		Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Cakupan Penerbitan KIA	Dispendukcapil	
			Prosentase Cakupan Penerbitan KK		
			Prosentase Cakupan Penerbitan KTP EI		
		Program Pencatatan Sipil	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Dispendukcapil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Yang Disusun		
			Prosentase Pelaporan Data Administrasi Kependudukan		
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Inovasi Pelayanan Yang Diterapkan		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan			
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat DPRD		
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)			
		Program Pemenuhan UKP Dan UKM	Persentase pencapaian SPM Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan	Dinas Kesehatan, RSUD Jombang & RSUD Ploso		
			Persentase Pencapaian SPM Pelayanan Medik dan Keperawatan serta Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik			
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
			Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)			
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik			
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggungjawaban nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Kecamatan		
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Desa Yang Diakomodir Dalam RKPD			
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			
			Jumlah Dokumen Perencanaan & Pembangunan Desa Yang Ditetapkan			
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Monev Yang Ditindaklanjuti			
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Sekretariat Daerah	
			Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian			

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN	
			Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu			
			Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu			
			Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya			
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualitas ASN	BKDPP	
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Dimensi Kompetensi Pada IP ASN		
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Dinas Komunikasi & Informatika	
				Indeks SPBE Terkait Layanan Komunikasi Dan Informatika (18 Indikator)		
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika		
				Persentase data Sektoral yang dipublikasikan		
2	Prioritas II : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Prioritas III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Prioritas IV : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan Yang Aktif	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport Mutu Pendidikan	Dikbud		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Kualifikasi			
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Pembangunan Dibidang Sosial Kemasyarakatan	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator SPM Program Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Terpenuhi	Dinkes		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase capaian indikator program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standart		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Memenuhi Standar		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase desa yang melakukan pembudayaan olahraga secara rutin	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang ter-update tepat waktu	DPPKB & PPPA	
			Persentase rekomendasi pengendalian penduduk yang ditindaklanjuti		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak		
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan		
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang terselesaikan		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif		
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Presentase Perkawinan Pertama Wanita Usia < 20 Tahun		
			Presentase Keluarga Sejahtera		
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Penerima Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Berdaya		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan nasional yang terkelola sesuai standar		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis, PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza Di Luar Panti Sosial Yang Berhasil Meandiri			
		Program Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang korbannya terfasilitasi			
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Satpol PP		
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Kecamatan		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
			Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Ditetapkan			
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
			Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang Ditetapkan	Bakesbangpol		
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Jumlah Potensi Konflik yang Tertangani			
			Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan			

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Sosial	Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Budaya Daerah yang Dilestarikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Jenis Seni Daerah yang Dilestarikan		
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Jenis Cagar Budaya yang Dipelihara Pemerintah Daerah		
3	Prioritas I : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Prioritas V: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional yang Masuk	DPM PTSP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Tindak Lanjut Promosi Penanaman Modal		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal		
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dan Instruktur Yang Lulus Uji Kompetensi Persentase LPK yang Terakreditasi	Dinas Tenaga Kerja	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Persentase Pencari Kerja yang Berwirausaha Mandiri		
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan		
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berangkat		
		Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Ditetapkan Perkembangannya Statusnya	DPMD	
			Persentase Desa yang Memiliki Perdes Kewenangan Desa		
			Program Peningkatan Kerja sama Desa		Persentase Kawasan Perdesaan yang Aktif Persentase Kerjasama Antar Desa yang Aktif Persentase Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang Aktif
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Melaporkan LPPDes Tepat Waktu		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
			Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu		
			Persentase Aparatur Pemerintah		
			Desa yang dilantik		
			Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu		
			Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Dalam Proses Pembangunan		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkembang	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah Destinasi Pariwisata yang Menjadi Tujuan Utama		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengelola Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terlatih		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Realisasi PAD Sektor Pasar Daerah		
			Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Sarana Distribusi Perdagangan		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Stabil		
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
			Persentase Peningkatan PAD Sektor Metrologi Legal		
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Ekspor Yang Terfasilitasi		
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Kelompok Usaha Yang Berorientase Ekspor		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas Tenaga Kerja Industri		
			Prosentase Produk Yang Sudah Terstandarisasi Dan HKI		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
			Persentase Inisiasi Tahapan Pembentukan Kawasan Industri		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pengawasan Industri Dalam Siinas		
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perijinan		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Fasilitas Legalitas Industri Sesuai Standar Dan Sesuai Kewenangan Daerah		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Omset (Berdaya)		
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UM Yang Mengalami Peningkatan Pendapatan		
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mempunyai Usaha Selain Simpan Pinjam	Dinas Koperasi & UM	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang berizin		
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai indeks pertanaman	Dinas Pertanian	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian		
		Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian		
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kehilangan Hasil (Losses)		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Hasil Olahan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase Pertumbuhan Produksi Ikan Budidaya		
			Persentase peningkatan produksi benih		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Prosentase Pertumbuhan Produksi Ikan Tangkap		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase desa sangat tahan pangan		
			Persentase daerah rentan rawan pangan		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase sampel uji yang aman		
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase peningkatan cadangan pangan masyarakat		
			Persentase cadangan pangan masyarakat		
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG		
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Dinas Peternakan	
			Prosentase angka kejadian penyakit ternak ruminansia		
			Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan halal) yang beredar di masyarakat		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan populasi ternak		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan Sumber	Nilai Kinerja Sistem Irigasi		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Daya Air (SDA)			
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan		
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Nilai SPM Tata Bangunan		
		Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan		
		Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi		
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi		
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas		Dinas Perhubungan
	Presentase Fasilitas Perhubungan Yang Di Bangun				
4	Prioritas VI : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi		
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan		
		Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan Yang Tertangani		
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan		
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni				

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan sesuai standar	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang tertangani		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan RTH		
			Persentase Penambahan luasan Tutupan lahan di Taman Kehati		
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kader aktif		
			Persentase lembaga aktif		
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan		
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Tutupan Lahan Di Kawasan Lindung		
			Prosentase Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu		
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Jenis Layanan Penanggulangan Bencana Yang Dipenuhi	BPBD	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran Dalam Waktu Tanggap (Respon Time)		

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.

Dengan mempedomani tema RKP Tahun 2023 maka tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah “Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro”. Selanjutnya untuk mencapai tujuan dari pembangunan Provinsi Jawa Timur maka ditetapkan prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar Wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dirinci ke dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
1	Prioritas VII : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	Semua Perangkat Daerah	
			Nilai Penilaian Mandiri SPBE	Sekretariat Daerah	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kategori sangat tinggi.
		Persentase peningkatan Inovasi Daerah			
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD		
			Persentase Capaian Kinerja Program RKPD dengan Kategori Tinggi		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	BPKAD	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
			Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja OPD		
			Tingkat ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban APBD		
			Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD		
		Tingkat Ketetapan waktu penyampaian LKPD ke BPK			
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase unit kearsipan yang menjamin keselamatan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai (APIP Dan BPK)	Inspektorat			
Program Perumusan Kebijakan,	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	Inspektorat			

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Dan Penyusunan Perundang - Undangan	Sekretariat Daerah	
			Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat		
			Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan		
			Nilai LPPD		
			Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		
			Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Di Tetapkan Tepat Waktu		
			Persentase Kebijakan Bidang Tata Pemerintahan Yang Ditetapkan		
			Persentase Produk Hukum Yang Ditetapkan Tepat Waktu		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Tepat Waktu Sesuai Sop	DPM PTSP	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dihasilkan	DPM PTSP	
			Persentase layanan Perizinan yang tepat waktu sesuai SOP		
		Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Cakupan Penerbitan KIA		
			Prosentase Cakupan Penerbitan KK		
			Prosentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik		
		Program Pencatatan Sipil	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Yang Disusun	Dispendukcapil	
			Prosentase Pelaporan Data Administrasi Kependudukan		
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Inovasi Pelayanan Yang Diterapkan		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat DPRD	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
		Program Pemenuhan UKP Dan UKM	Persentase pencapaian SPM Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan	Dinas Kesehatan, RSUD Jombang & RSUD Ploso	
			Persentase Pencapaian SPM Pelayanan Medik dan Keperawatan serta Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik		
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)		
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik		
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggungjawaban nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Kecamatan	
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Desa Yang Diakomodir Dalam RKPD		
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		
			Jumlah Dokumen Perencanaan & Pembangunan Desa Yang Ditetapkan		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Monev Yang Ditindaklanjuti		
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	
			Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian		
Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu					
Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat					

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN		
			waktu				
			Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya				
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualitas ASN	BKDPP			
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Dimensi Kompetensi Pada IP ASN				
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Dinas Komunikasi & Informatika			
			Indeks SPBE Terkait Layanan Komunikasi Dan Informatika (18 Indikator)				
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika				
			Persentase data Sektoral yang dipublikasikan				
		2	Prioritas II : Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Prioritas III : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Prioritas IV : Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan Yang Aktif	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
				Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport Mutu Pendidikan	Dikbud	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Kualifikasi						
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung Perpustakaan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Pembangunan Dibidang Sosial Masyarakat			Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata			
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator SPM Program Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Terpenuhi			Dinkes			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase capaian indikator program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standart						

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN	
	Nilai- Nilai Budaya Lokal	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Memenuhi Standar			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase desa yang melakukan pembudayaan olahraga secara rutin	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata		
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang ter-update tepat waktu	DPPKB & PPPA		
			Persentase rekomendasi pengendalian penduduk yang ditindaklanjuti			
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak			
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan			
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang terselesaikan			
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif			
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Presentase Perkawinan Pertama Wanita Usia < 20 Tahun			
			Presentase Keluarga Sejahtera			
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Penerima Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial			Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Berdaya			
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan nasional yang terkelola sesuai standar			
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis, PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza Di Luar Panti Sosial Yang Berhasil Meandiri			
	Program Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang korbannya terfasilitasi				

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada Serta Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.	Satpol PP	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Kecamatan	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Di Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	
			Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang Ditetapkan		
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
			Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Yang Ditetapkan		
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik Yang Tertangani		
			Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Yang Ditetapkan		
			Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Yang Ditetapkan		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Budaya Daerah Yang Dilestarikan		Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Jenis Seni Daerah Yang Dilestarikan		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Jenis Cagar Budaya Yang Dipelihara Pemerintah Daerah		
3	Prioritas I: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata Prioritas V: Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional Yang Masuk	DPM PTSP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Tindak Lanjut Promosi Penanaman Modal		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal		
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Dan Instruktur Yang Lulus Uji Kompetensi Persentase Lpk Yang Terakreditasi	Dinas Tenaga Kerja	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan Persentase Pencari Kerja Yang Berwirausaha Mandiri		
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang terselesaikan		
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang berangkat		
		Program Penataan Desa	Persentase desa yang ditetapkan perkembangan statusnya persentase desa yang memiliki perdes kewenangan desa	DPMD	
		Program Peningkatan Kerja sama Desa	persentase kawasan perdesaan yang aktif		
			persentase kerjasama antar desa yang aktif		
			persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan		
			LPPDes tepat waktu		
			Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu		
			Persentase Aparatur Pemerintah		
	Desa yang dilantik				
	Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu				

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
			Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Proses Pembangunan		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Yang Berkembang	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Menjadi Tujuan Utama		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengelola Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Realisasi PAD Sektor Pasar Daerah	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
			Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Sarana Distribusi Perdagangan		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Stabil		
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP Yang Sesuai Standar		
			Persentase Peningkatan PAD Sektor Metrologi Legal		
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Ekspor Yang Terfasilitasi		
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Kelompok Usaha Yang Berorientase Ekspor		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas Tenaga Kerja Industri		
			Prosentase Produk Yang Sudah Terstandarisasi Dan HKI		
			Persentase Inisiasi Tahapan Pembentukan Kawasan Industri		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pengawasan Industri Dalam Siinas		
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perijinan		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Fasilitasi Legalitas Industri Sesuai Standar Dan Sesuai Kewenangan Daerah		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Omset (Berdaya)	Dinas Koperasi & UM	
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UM Yang Mengalami Peningkatan Pendapatan		
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mempunyai Usaha Selain Simpan Pinjam		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang berizin		
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai indeks pertanaman		Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian		
		Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian		
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kehilangan Hasil (Losses)		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian		
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Hasil Olahan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase Pertumbuhan Produksi Ikan Budidaya		
			Persentase peningkatan produksi benih		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Prosentase Pertumbuhan Produksi Ikan Tangkap		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase desa sangat tahan pangan			
			Persentase daerah rentan rawan pangan			
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase sampel uji yang aman			
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase peningkatan cadangan pangan masyarakat			
			Persentase cadangan pangan masyarakat			
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG			
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis			Dinas Peternakan
			Prosentase angka kejadian penyakit ternak ruminansia			
			Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan halal) yang beredar di masyarakat			
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha			
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan populasi ternak			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap			Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Nilai Kinerja Sistem Irigasi			
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan			
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Nilai SPM Tata Bangunan					
Program Penataan Bangunan Gedung	Nilai SPM Tata Bangunan					
Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi					

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi	Dinas Perhubungan	
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Presentase Fasilitas Perhubungan Yang Di Bangun		
4	Prioritas VI : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Tertehabillitasi		
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan		
		Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan Yang Tertangani		
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan Persentase penanganan rumah tidak layak huni		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan sesuai standar	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang tertangani		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan RTH Persentase Penambahan luasan Tutupan lahan di Taman Kehati		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kader aktif		
			Persentase lembaga aktif		
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan		
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Tutupan Lahan Di Kawasan Lindung		
			Prosentase Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu		
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Jenis Layanan Penanggulangan Bencana Yang Dipenuhi	BPBD	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran Dalam Waktu Tanggap (Respon Time)		

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan". Merujuk pada tema tersebut dan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur, pembangunan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk pembangunan SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah;
4. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Adapun sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya investasi daerah dengan indikator prosentase peningkatan realisasi investasi sebesar 4,27%;
2. Meningkatnya PDRB sektor unggulan dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor unggulan sebesar 3,27%;
3. Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator Prosentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 20%
4. Meningkatnya infrastruktur pendukung daya saing dengan indikator Indeks pembangunan infrastruktur sebesar 0,7456.

Berdasarkan tema pembangunan, prioritas pembangunan, dan sasaran pembangunan, maka prioritas pembangunan Kabupaten Jombang berdasarkan prioritas daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Prioritas I : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	Semua Perangkat Daerah	980.458.391.847	
				Nilai Penilaian Mandiri SPBE	Sekretariat Daerah	-	
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.140.313.650	
				Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kategori sangat tinggi.		896.263.400	
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase peningkatan Inovasi Daerah	-		
				Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	1.220.777.300		
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RKPD dengan Kategori Tinggi	-		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	2.589.577.050	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	549.666.944.512	
				Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja OPD	-		
				Tingkat ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban APBD	-		
				Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD dan RPAPBD ke DPRD	-		
				Tingkat Ketetapan waktu penyampaian LKPD ke BPK	-		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	2.585.856.950				

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase unit kearsipan yang menjamin keselamatan arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.488.700	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai (APIP Dan BPK)	Inspektorat	121.892.400	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase kebijakan teknis pengawasan yang diterbitkan	Inspektorat	141.206.000	
				Persentase tindak lanjut selesai atas rekomendasi asistensi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal		-	
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Dan Penyusunan Perundang - Undangan	Sekretariat Daerah	24.313.831.100	
				Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat		-	
				Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan		-	
				Nilai LPPD		-	
				Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		-	
				Persentase Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Di Tetapkan Tepat Waktu		-	
				Persentase Kebijakan Bidang Tata Pemerintahan Yang Ditetapkan		-	
				Persentase Produk Hukum Yang Ditetapkan Tepat Waktu		-	
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Tepat Waktu Sesuai Sop	DPM PTSP	299.173.500	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dihasilkan	DPM PTSP	301.019.000	
				Persentase layanan Perizinan yang tepat waktu sesuai SOP		-	
			Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Cakupan Penerbitan KIA	Dispendukcapil	114.100.000	
		Prosentase Cakupan Penerbitan KK		-			

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
				Prosentase Cakupan Penerbitan KTP EI		-	
			Program Pencatatan Sipil	Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		89.940.500	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Cakupan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Yang Disusun		113.816.700	
				Prosentase Pelaporan Data Administrasi Kependudukan		-	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Inovasi Pelayanan Yang Diterapkan		5.808.500	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan		130.613.400	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat DPRD	23.734.652.000	
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)		-	
			Program Pemenuhan UKP Dan UKM	Persentase pencapaian SPM Tata Usaha, Keuangan dan Perencanaan	Dinas Kesehatan, RSUD Jombang & RSUD Ploso	-	
				Persentase Pencapaian SPM Pelayanan Medik dan Keperawatan serta Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik		-	
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.953.681.200	
				Indeks Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)		-	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik		135.938.900	
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah dan pertanggungjawaban nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	134.651.400	
			Program	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Kecamatan	498.645.700	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		-		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Usulan Desa Yang Diakomodir Dalam RKPD		4.725.199.750		
				Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		-		
				Jumlah Dokumen Perencanaan & Pembangunan Desa Yang Ditetapkan		-		
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Rekomendasi Hasil Monev Yang Ditindaklanjuti		197.095.700		
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah	1.201.627.800		
				Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian			-	
				Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu			-	
				Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu			-	
				Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya			-	
		Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kualitas ASN	BKDPP	2.768.191.500		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Dimensi Kompetensi Pada IP ASN			2.905.518.400	
		Sasaran 4 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Dinas Komunikasi & Informatika	3.610.605.000		
				Indeks SPBE Terkait Layanan Komunikasi Dan Informatika (18 Indikator)			-	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika			331.450.000	
				Persentase data Sektoral yang dipublikasikan			-	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
2	Prioritas II : Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan Ekstrem	Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Pendidikan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Organisasi Kepramukaan Yang Aktif	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	400.000.000	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport Mutu Pendidikan	Dikbud	92.051.161.085	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Kualifikasi		1.081.831.350	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	375.422.600	
		Sasaran 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Pembangunan Dibidang Sosial Kemasyarakatan	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	503.465.650	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator SPM Program Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Yang Terpenuhi	Dinkes	462.937.611.365	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase capaian indikator program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		249.553.800	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standart		136.573.500	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Memenuhi Standar		90.297.500	
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase desa yang melakukan pembudayaan olahraga secara rutin		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.832.546.435
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase data kecamatan yang ter-update tepat waktu	DPPKB & PPPA	79.355.350	
				Persentase rekomendasi pengendalian		-	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
				penduduk yang ditindaklanjuti			
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pertumbuhan Akseptor KB Aktif		115.457.620	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Presentase Perkawinan Pertama Wanita Usia < 20 Tahun		-	
				Presentase Keluarga Sejahtera		338.411.950	
		Sasaran 7 : Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	DPPKB & PPPA	172.908.300	
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak		172.863.750	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus tindak kekerasan pada anak yang terselesaikan		164.518.050	
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang terselesaikan		661.141.300	
		Sasaran 15 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Penerima Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	13.615.772.500	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Berdaya		960.939.600	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis, PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza Di Luar Panti Sosial Yang Berhasil Meandiri		1.324.130.200	
			Program Penanganan Bencana	Persentase kejadian bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang korbannya terfasilitasi		165.400.000	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
		Sasaran 8 : Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada Serta Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.	Satpol PP	3.980.928.919	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan nasional yang dikelola sesuai standar	Dinas Sosial	25.000.000	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Kecamatan	185.394.400	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Di Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	245.396.000	
				Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang Ditetapkan		-	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		5.481.205.350		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Serta Budaya Politik	Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Yang Ditetapkan		-	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		4.198.404.250	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase Peningkatan Pemahaman Peserta Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		208.049.500	
				Jumlah Potensi Konflik Yang Tertangani		763.382.950	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Yang Ditetapkan		-	
				Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Yang Ditetapkan		-	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jenis Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	677.506.500	
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Jenis Seni Daerah Yang Dilestarikan		1.018.146.000	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Jenis Cagar Budaya Yang Dipelihara Pemerintah Daerah		404.320.200	
3	Prioritas III : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah	Sasaran 9 : Meningkatnya Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional Yang Masuk	DPM PTSP	139.322.500	
			Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Tindak Lanjut Promosi Penanaman Modal		889.779.550	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal		75.119.400	
		Sasaran 14 : Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Dan Instruktur Yang Lulus Uji Kompetensi Persentase Lpk Yang Terakreditasi	Dinas Tenaga Kerja	651.316.300	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan		372.098.500	
				Persentase Pencari Kerja Yang Berwirausaha Mandiri		-	
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang terselesaikan		161.267.500	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang berangkat	154.483.000					

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN	
		Sasaran 10 : Meningkatnya Keberdayaan Desa	Program Penataan Desa	Persentase desa yang ditetapkan perkembangan statusnya	DPMD	57.487.450		
						persentase desa yang memiliki perdes kewenangan desa	-	
			Program Peningkatan Kerja sama Desa	persentase kawasan perdesaan yang aktif		27.977.000		
						persentase kerjasama antar desa yang aktif	-	
						persentase kerjasama desa dengan pihak ketiga yang aktif	-	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan LPPDes tepat waktu		566.842.150		
						Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	-	
						Persentase Aparatur Pemerintah	-	
						Desa yang dilantik	-	
						Persentase desa yang melaporkan inventarisasi aset desa tepat waktu	-	
				Persentase desa yang telah menyusun produk hukum sesuai kewenangannya	-			
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Dalam Proses Pembangunan	530.839.900				
		Sasaran 11 : Meningkatnya Kunjungan Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata Yang Berkembang	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.115.918.324		
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Menjadi Tujuan Utama			475.651.400	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengelola Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Terlatih			196.689.650	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
		Sasaran 12 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Realisasi PAD Sektor Pasar Daerah	Dinas Perindustrian & Perdagangan	7.178.813.858	
				Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Sarana Distribusi Perdagangan		-	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Stabil		106.987.300	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP Yang Sesuai Standar		207.791.600	
				Persentase Peningkatan PAD Sektor Metrologi Legal		-	
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha Ekspor Yang Terfasilitasi		428.050.550	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Kelompok Usaha Yang Berorientase Ekspor		124.762.550	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Produktivitas Tenaga Kerja Industri		924.530.900	
				Prosentase Produk Yang Sudah Terstandarisasi Dan HKI		-	
				Persentase Inisiasi Tahapan Pembentukan Kawasan Industri		-	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pengawasan Industri Dalam Siinas		4.390.000	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perijinan		16.495.550	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Fasilitasi Legalitas Industri Sesuai Standar Dan Sesuai Kewenangan Daerah		44.360.000	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Omset (Berdaya)		395.814.850	Dinas Koperasi & UM
		Program Pengembangan UMKM		Persentase Peningkatan UM Yang Mengalami Peningkatan Pendapatan	247.338.030		

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Mempunyai Usaha Selain Simpan Pinjam		199.041.400	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Kompeten		50.038.400	
		Sasaran 14 : Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang berizin		56.848.988	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu		51.355.338	
		Sasaran 12 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai indeks pertanaman	Dinas Pertanian	4.910.974.995	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Mekanisasi Pertanian		5.288.300.455	
			Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Produktivitas Pertanian		1.736.353.965	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Kehilangan Hasil (Losses)		384.699.650	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian		31.665.100	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tambah Hasil Olahan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	115.655.850	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase Pertumbuhan Produksi Ikan Budidaya		710.782.550	
				Persentase peningkatan produksi benih		-	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Prosentase Pertumbuhan Produksi Ikan Tangkap		72.158.700	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase desa sangat tahan pangan		13.888.000	
		Persentase daerah rentan rawan pangan		-			
		Program Pengawasan	Prosentase sampel uji yang aman	92.748.400			

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		-	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase peningkatan cadangan pangan masyarakat		146.000.000	
				Persentase cadangan pangan masyarakat		-	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG		338.016.150	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		784.361.163	
				Prosentase angka kejadian penyakit ternak ruminansia	Dinas Peternakan	-	
				Prosentase produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan halal) yang beredar di masyarakat		-	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase peningkatan rekomendasi izin usaha		23.133.550	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan populasi ternak		512.158.650	
		Sasaran 13 : Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Daya Saing	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap		42.613.327.241	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Nilai Kinerja Sistem Irigasi		2.176.087.000	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Ketentuan	Dinas PUPR	1.681.896.040	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Nilai SPM Tata Bangunan		100.004.000	
			Program Penataan	Nilai SPM Tata Bangunan		323.155.200	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN	
4	Prioritas IV : Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup	Sasaran 16 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	Bangunan Gedung		Dinas Perhubungan			
			Program Penatagunaan Tanah	Prosentase bidang tanah yang menjadi data spasial yang di validasi		105.987.200		
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai SPM Bina Konstruksi		173.597.850		
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapa	Persentase Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang di tindak lanjuti		212.981.000		
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas		7.607.985.778		
				Presentase Fasilitas Perhubungan Yang Di Bangun	-			
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	Dinas Perumahan dan Permukiman	174.521.000	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani		5.662.324.800	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Yang Terbangun / Terehabilitasi		4.922.511.176	
				Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan		3.072.981.480	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1.005.468.700					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan Yang Tertangani	600.000.000					
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	970.146.600					
		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	-					
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan sesuai standar	Dinas Lingkungan Hidup	273.167.000				

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SKPD PELAKSANA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang tertangani		91.204.701	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Penambahan luas tutupan lahan RTH		1.939.783.300	
				Persentase Penambahan luasan Tutupan lahan di Taman Kehati		-	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kader aktif		218.037.300	
				Persentase lembaga aktif		-	
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan		6.622.237.250	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Tutupan Lahan Di Kawasan Lindung		2.228.754.150	
				Prosentase Sampel Yang Memenuhi Baku Mutu		-	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Jenis Layanan Penanggulangan Bencana Yang Dipenuhi		755.835.000	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran Dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	BPBD	717.855.000	

3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Di bawah ini tabel 3.4 disampaikan program prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator kinerja.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dimana dalam menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun selain itu juga harus disinkronkan dengan rencana kerja pemerintah provinsi.

Untuk lebih memahami plafon anggaran maka akan lebih mudah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana diuraikan berikut ini :

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan daerah, maka plafon anggaran sementara untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dirinci dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Plafon anggaran sementara berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	1.606.801.552.780
	a. Belanja Pegawai	898.831.717.793
	b. Belanja Barang dan Jasa	625.756.939.453
	c. Belanja Bunga	-
	d. Belanja Subsidi	-
	e. Belanja Hibah	66.676.420.534
	f. Belanja Bantuan Sosial	15.536.475.000
2	BELANJA MODAL	162.835.148.922
	a. Belanja Modal Tanah	47.076.000.000
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.742.950.532
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.913.946.181
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.419.302.209
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.527.950.000
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	155.000.000
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.075.320.435
	a. Belanja Tidak Terduga	16.075.320.435
4	BELANJA TRANSFER	531.159.503.577
	a. Belanja Bagi Hasil	16.732.501.627
	b. Belanja Bantuan Keuangan	514.427.001.950
JUMLAH BELANJA		2.316.871.525.714

Sumber : BPKAD Kab. Jombang Tahun 2022

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dalam struktur APBD menempati posisi yang strategis sebagai unsur penyeimbang akan adanya surplus maupun defisit anggaran.

Pada struktur APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan terjadi defisit sebesar Rp.192.515.046.776,00. Upaya untuk menutupi defisit tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp.212.515.046.776,00 dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.20.000.000.000,00. Selain penerimaan pembiayaan, terdapat pula pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.40.000.000.000,00 yang terdiri dari pembentukan dana cadangan Rp.20.000.000.000,00 dan pembayaran pokok utang Rp.20.000.000.000,00. Rencana pembiayaan daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 secara rinci disajikan dalam tabel 5.1 berikut :

Tabel 5. 1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3
6	Pembiayaan Daerah	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	212.515.046.776
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	20.000.000.000
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
6.1.06	Penerimaan piutang daerah	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		232.515.046.776
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01	Pembentukan dana cadangan	20.000.000.000

6.2.02	Penyertaan modal (Investasi) daerah	
6.2.03	Pembayaran pokok utang	20.000.000.000
6.2.04	Pemberian pinjaman daerah	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		40.000.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		192.515.046.776

Sumber : BPKAD Kab. Jombang Tahun 2022

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Kesepakatan ini akan disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah guna memberikan fleksibilitas dalam penjabaran selanjutnya.

Jombang, 11 Agustus 2022

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

Selaku
PIHAK KEDUA



H. MAS'UD ZUREMI

KETUA



DONNY ANGGUN, S.Sos
WAKIL KETUA



FARID AL FIRISI
WAKIL KETUA



ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA

BUPATI JOMBANG

Selaku
PIHAK PERTAMA



H. MUNDJIDAH WAHAB



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 900/ 1464 /415.44/2023
 : **188/ 12 /Pimp.DPRD/415.14/2023**
TANGGAL : **31 Juli 2023**

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2023



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 900/ 1464 /415.44/2023
188/ 12 /Pimp.DPRD/415.14/2023

TANGGAL : **31 Juli 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. MUNDJIDAH WAHAB
Jabatan : Bupati Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang.
2. a. N a m a : H. MAS'UD ZUREMI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
b. N a m a : DONNY ANGGUN, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
c. N a m a : FARID AL FARISI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
d. Nama : ARIF SUTIKNO, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan rencana perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Jombang, 31 Juli 2023

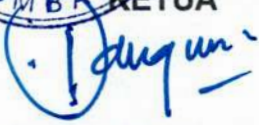

BUPATI JOMBANG
selaku
PIHAK PERTAMA


H. MUNDJIDAH WAHAB


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**


selaku
PIHAK KEDUA

H. MAS'UD ZUREMI
KETUA


DONNY ANGGUN, S.Sos
WAKIL KETUA


FARID AL FARISI
WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS	2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	6
2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6
2.1.1. Pajak Daerah.....	6
2.1.2. Retribusi Daerah.....	7
2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	7
2.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah.....	7
2.2. Pendapatan Transfer	7
2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	9
2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah	9
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	11
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	17
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN	18
BAB VI PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Perubahan PPAS Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	9
Tabel 3. 1. Perubahan PPAS Per urusan Pemerintahan Per SKPD	11
Tabel 3. 2 Rincian Perubahan PPAS per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	15
Tabel 3. 3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.....	16
Tabel 4. 1 Perubahan PPAS Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
Tabel 5. 1 Perubahan PPAS Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk mendanai setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta tahapan lanjutan dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023. Perubahan asumsi-asumsi yang disepakati dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 menjadi dasar dalam penyesuaian kemampuan pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selain itu, kebijakan nasional dan regional yang terkait kemampuan pendanaan pembangunan yang terbit setelah APBD ditetapkan menjadi bahan penyempurna. Selanjutnya, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disampaikan kepada legislatif untuk dibahas dan disepakati bersama dengan eksekutif menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah.

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati, selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan pada Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan adanya penyusunan Perubahan PPAS diharapkan pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan secara menyeluruh.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), memberikan gambaran secara garis besar kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023

Selain itu, berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 menetapkan perubahan rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan Perangkat Daerah, perubahan Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, serta perubahan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan PPAS

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319)
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 219-7/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur Nomor 57-1/2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 234-8/2021);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 135-6/2022);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 209-7/2022);
29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E);
30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 29/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 87/E);
31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 81/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 27/A).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan pada kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun 2023, maka target perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan sebesar Rp. 552.638.602.730,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.051.730.286 atau sekitar 3.38% dibandingkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.163.627.000.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.15.804.350.000 atau sekitar 10,69% dibanding target pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023. Kenaikan Pajak Daerah ini diestimasikan pada beberapa komponen penyumbang dengan kenaikan terbesar pada pos Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 9.750.000.000 dan Pajak Restoran sebesar Rp. 2.500.000.000 serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.2.489.350.000, akan tetapi secara prosentase kenaikan terbesarnya berasal dari Pajak Hotel sebesar 60% serta Pajak Restoran sebesar 62,50%.

2.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 19.862.764.623 mengalami kenaikan sebesar Rp. 360.398.350 atau sekitar 1,85% dari target Penetapan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023. Komponen Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 13.431.759.740, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.4.278.504.883 dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp. 2.152.500.000 dengan kenaikan terbesar berasal dari komponen Retribusi Jasa Usaha yang naik sebesar Rp.523.078.600.

2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bagian laba (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diproyeksikan sebesar Rp.7.308.019.426 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.089.755.025 atau sekitar 40,05% dibanding target pendapatan dalam Penetapan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023, dengan kenaikan bagian laba (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN yaitu Dividen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur naik sebesar Rp.1.738.356.164 diikuti bagian laba (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD naik sebesar Rp.351.398.861 akan tetapi secara prosentase kenaikan terbesarnya berasal dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada PD Panglungan dan Perumdam Aneka Usaha Seger sebesar 74,45%

2.1.4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah diestimasikan sebesar Rp.361.840.818.681 mengalami penurunan sebesar Rp. 202.773.089 atau sekitar 0,06% dibanding target pada Penetapan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023. Dari beberapa komponen pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, komponen yang mengalami penurunan berasal dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.269.279.364 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp.2.205.477.610 serta Jasa Giro sebesar Rp.2.175.000.000.

2.2. Pendapatan Transfer

Pos Pendapatan Transfer diasumsikan sebesar Rp.2.239.777.574.679 mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.599.399.679 atau sekitar 1,39% dibandingkan penetapan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

- 188/894/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1004/KPTS/013/2022 tentang alokasi sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/795/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 830.653.800,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*)
 4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 412.2/304/112.3/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov. Jatim TA. 2023 (Program Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya), dan Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023) bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
 5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan sebesar Rp. 4.754.260.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
 6. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/2812/112.2/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp. 1.952.100.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*)
 7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900/3004/125.1/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk Revitalisasi Pasar Ploso di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat tidak mengalami perubahan dari target pada Penetapan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

2.4. Target Perubahan Pendapatan Daerah

Target Perubahan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 1 Target Perubahan PPAS Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5=4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	534.586.872.444	552.638.602.730	18.051.730.286	
4.1.01	Pajak Daerah	147.822.650.000	163.627.000.000	15.804.350.000	Perda No. 1 Tahun 2020
4.1.02	Retribusi Daerah	19.502.366.273	19.862.764.623	360.398.350	Perda No. 2 Tahun 2020 Perda No. 5 Tahun 2020 Perda No. 6 Tahun 2020
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.218.264.401	7.308.019.426	2.089.755.025	Surat Bank Jatim No: 062/222/DIR/OP R/SRT Hasil audit oleh auditor eksternal atas laba BUMD
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	362.043.591.770	361.840.818.681	(202.773.089)	Proyeksi
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.209.178.175.000	2.239.777.574.679	30.599.399.679	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.037.728.175.000	2.030.000.785.879	(7.727.389.121)	Perpres No.130 Tahun 2022
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.450.000.000	209.776.788.800	38.326.788.800	Kep.Gub JATIM No.188/894/KPT S/013/2022 Kep.Gub JATIM No.188/1004/KP TS/013/2022
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	542.658.000	542.658.000	0	
4.3.01	Pendapatan Hibah	542.658.000	542.658.000	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan	0	0	0	

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5=4-3	6
	Peraturan Perundang-undangan				
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.744.307.705.444	2.792.958.835.409	48.651.129.965	

Sumber : BPKAD Kab. Jombang, Tahun 2023

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terdapat pada dokumen perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan hal-hal antara lain :

1. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat dan wajib untuk dilaksanakan.
2. Kewajiban pengalokasian belanja yang bersifat diarahkan.
3. Kewajiban terhadap belanja wajib dan mengikat yang ada di setiap SKPD.
4. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan Juni 2023 dan prognosis.
5. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu.
6. Adanya kegiatan yang bersifat penuntasan target Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.
7. Adanya kegiatan pendukung yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.
8. Adanya kegiatan yang merupakan bagian strategis untuk meningkatkan pelayanan publik.
9. Mempertimbangkan kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan dan dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2023.

Adapun Plafon Anggaran Sementara Per Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Perubahan PPAS Per Urusan Pemerintahan Per SKPD

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.799.346.613.709	1.852.743.524.686	53.396.910.977
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	846.182.914.394	867.000.757.499	20.817.843.105
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	846.182.914.394	867.000.757.499	20.817.843.105
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	713.425.559.936	696.168.659.022	- 17.256.900.914
2.1	Dinas Kesehatan	331.244.265.397	327.093.175.799	-4.151.089.598
2.2	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	308.190.721.104	315.075.992.036	6.885.270.932
2.3	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	73.990.573.435	53.999.491.187	- 19.991.082.248
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	177.984.408.665	225.703.330.518	47.718.921.853
3.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.009.230.259	168.049.475.006	41.040.244.747
3.2	Dinas Perumahan dan Permukiman	49.075.178.406	55.753.855.512	6.678.677.106
3.3	Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000.000	1.900.000.000	-
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.650.608.972	19.723.672.275	1.073.063.303
4.1	Dinas Perumahan dan Permukiman	18.650.608.972	19.723.672.275	1.073.063.303
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.469.431.735	21.177.930.142	-291.501.593
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	15.514.117.449	14.647.616.256	-866.501.193
5.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.955.314.286	6.530.313.886	574.999.600
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	21.633.690.007	22.969.175.230	1.335.485.223
6.1	Dinas Sosial	21.633.690.007	22.969.175.230	1.335.485.223
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	163.653.947.472	184.647.081.849	20.993.134.377
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.729.526.949	6.554.721.619	825.194.670
7.1	Dinas Tenaga Kerja	5.729.526.949	6.554.721.619	825.194.670
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.203.605.750	1.253.723.750	50.118.000
8.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.203.605.750	1.253.723.750	50.118.000
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.098.693.268	6.734.018.268	635.325.000
9.1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.098.693.268	6.734.018.268	635.325.000
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	412.198.200	612.957.020	200.758.820
10.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	412.198.200	612.957.020	200.758.820
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.298.700.518	32.160.785.955	3.862.085.437
11.1	Dinas Lingkungan Hidup	28.298.700.518	32.160.785.955	3.862.085.437
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.863.234.379	9.204.468.879	1.341.234.500

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
12.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.863.234.379	9.204.468.879	1.341.234.500
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.518.344.710	10.174.469.710	2.656.125.000
13.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.518.344.710	10.174.469.710	2.656.125.000
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.911.114.953	20.110.762.375	199.647.422
14.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.911.114.953	20.110.762.375	199.647.422
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.112.792.483	40.582.154.222	4.469.361.739
15.1	Dinas Perhubungan	36.112.792.483	40.582.154.222	4.469.361.739
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.753.943.859	14.173.982.012	1.420.038.153
16.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.753.943.859	14.173.982.012	1.420.038.153
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.741.506.676	5.617.798.976	876.292.300
17.1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.741.506.676	5.617.798.976	876.292.300
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.563.279.359	9.802.239.321	238.959.962
18.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	9.563.279.359	9.802.239.321	238.959.962
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	14.968.982.508	17.689.302.232	2.720.319.724
19.1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14.968.982.508	17.689.302.232	2.720.319.724
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	331.450.000	442.623.750	111.173.750
20.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	331.450.000	442.623.750	111.173.750
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	135.938.900	235.438.800	99.499.900
21.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	135.938.900	235.438.800	99.499.900
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.261.612.500	4.498.612.500	1.237.000.000
22.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.261.612.500	4.498.612.500	1.237.000.000
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	380.206.550	512.259.474	132.052.924
23.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	380.206.550	512.259.474	132.052.924
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.368.815.910	4.286.762.986	-82.052.924
24.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.368.815.910	4.286.762.986	-82.052.924
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	78.058.464.805	92.188.716.471	14.130.251.666
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.873.927.600	1.968.550.000	94.622.400
25.1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.873.927.600	1.968.550.000	94.622.400
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.995.935.089	2.299.816.814	303.881.725
26.1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.995.935.089	2.299.816.814	303.881.725
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	47.844.034.903	54.108.220.877	6.264.185.974
27.1	Dinas Pertanian	39.088.651.879	43.616.500.653	4.527.848.774
27.2	Dinas Peternakan	8.755.383.024	10.491.720.224	1.736.337.200
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	25.263.438.169	31.869.246.634	6.605.808.465

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
30.1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.263.438.169	31.869.246.634	6.605.808.465
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	926.646.194	1.841.264.196	914.618.002
31.1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	926.646.194	1.841.264.196	914.618.002
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	154.482.850	101.617.950	-52.864.900
32.1	Dinas Tenaga Kerja	154.482.850	101.617.950	-52.864.900
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	150.461.176.307	172.820.386.543	22.359.210.236
1	SEKRETARIAT DAERAH	75.252.221.926	97.883.511.966	22.631.290.040
1	Sekretariat Daerah	75.252.221.926	97.883.511.966	22.631.290.040
2	SEKRETARIAT DPRD	75.208.954.381	74.936.874.577	-272.079.804
2	Sekretariat DPRD	75.208.954.381	74.936.874.577	-272.079.804
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	652.551.725.506	703.911.068.466	51.359.342.960
1	PERENCANAAN	11.441.278.169	12.759.263.821	1.317.985.652
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.441.278.169	12.759.263.821	1.317.985.652
2	KEUANGAN	627.352.966.292	676.460.262.700	49.107.296.408
2.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	611.766.508.879	657.533.527.499	45.767.018.620
2.2	Badan Pendapatan Daerah	15.586.457.413	18.926.735.201	3.340.277.788
3	KEPEGAWAIAN	9.957.747.745	10.497.505.473	539.757.728
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.957.747.745	10.497.505.473	539.757.728
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.896.799.400	3.031.103.172	134.303.772
4	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.896.799.400	3.031.103.172	134.303.772
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	902.933.900	1.162.933.300	259.999.400
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	902.933.900	1.162.933.300	259.999.400
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.324.336.799	13.909.592.949	585.256.150
1	INSPEKTORAT DAERAH	13.324.336.799	13.909.592.949	585.256.150
1	Inspektorat	13.324.336.799	13.909.592.949	585.256.150
	UNSUR KEWILAYAHAN	63.473.317.184	68.845.079.158	5.371.761.974
1	KECAMATAN	63.473.317.184	68.845.079.158	5.371.761.974
1	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	2.394.595.912	2.580.595.912	186.000.000
2	Kecamatan Bareng	2.673.789.685	2.939.789.685	266.000.000
3	Kecamatan Diwek	2.944.505.874	3.050.505.562	105.999.688
4	Kecamatan Gudo	2.718.298.257	3.012.208.257	293.910.000
5	Kecamatan Jogoroto	2.480.494.149	2.693.194.149	212.700.000
6	Kecamatan Jombang	11.303.166.652	11.514.085.832	210.919.180
7	Kecamatan Kabuh	2.674.385.231	2.960.385.231	286.000.000
8	Kecamatan Kesamben	2.585.610.062	2.771.610.062	186.000.000
9	Kecamatan Kudu	2.605.047.143	2.884.214.127	279.166.984
10	Kecamatan Megaluh	2.810.614.626	2.996.614.626	186.000.000
11	Kecamatan Mojoagung	3.036.207.424	3.307.207.424	271.000.000
12	Kecamatan Mojowarno	2.581.609.299	2.767.609.299	186.000.000
13	Kecamatan Ngoro	2.474.513.364	2.745.513.364	271.000.000
14	Kecamatan Ngusikan	2.561.540.984	2.788.475.049	226.934.065
15	Kecamatan Perak	2.851.997.105	3.118.952.552	266.955.447
16	Kecamatan Peterongan	2.303.319.267	2.489.319.267	186.000.000
17	Kecamatan Plandaan	2.270.858.617	2.740.958.617	470.100.000
18	Kecamatan Ploso	2.573.360.109	3.086.360.109	513.000.000
19	Kecamatan Sumobito	2.669.333.622	2.855.333.622	186.000.000
20	Kecamatan Tembelang	2.667.252.535	2.853.252.535	186.000.000
21	Kecamatan Wonosalam	2.292.817.267	2.688.893.877	396.076.610

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	15.953.170.438	52.984.031.162	37.030.860.724
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.953.170.438	52.984.031.162	37.030.860.724
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.953.170.438	52.984.031.162	37.030.860.724

Sumber : BPKAD Kab. Jombang, Tahun 2023

Tabel 3. 2 Rincian Perubahan PPAS per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

(Terlampir)

Tabel 3. 3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah / Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1	Belanja Operasi	2.104.513.563.448	2.194.661.937.217	90.148.373.769	4,28
5.1.01	Belanja pegawai	1.086.089.054.965	1.081.852.534.056	(4.236.520.909)	-0,39
5.1.02	Belanja barang dan jasa	845.955.627.649	865.693.155.224	19.737.527.575	2,33
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	131.851.953.834	205.804.046.437	73.952.092.603	56,09
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	38.616.927.000	39.312.201.500	695.274.500	1,80
5.2	Belanja Modal	270.012.848.531	340.606.660.027	70.593.811.496	26,14
5.2.01	Belanja Modal Tanah	42.076.000.000	42.240.290.000	164.290.000	0,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.331.719.389	71.987.235.543	7.655.516.154	11,90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.126.335.692	102.444.909.328	47.318.573.636	85,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.177.418.150	121.459.871.306	13.282.453.156	12,28
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.375.300	2.319.353.850	2.172.978.550	1.484,53
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	155.000.000	155.000.000	0	0
5.3	Belanja Tidak Terduga	17.174.693.664	17.568.387.463	393.693.799	2,29
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.174.693.664	17.568.387.463	393.693.799	2,29
5.4	BELANJA TRANSFER	545.121.646.577	589.212.496.577	44.090.850.000	8,09
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.732.501.627	20.632.501.627	3.900.000.000	23,31
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	528.389.144.950	568.579.994.950	40.190.850.000	7,61
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.936.822.752.220	3.142.049.481.284	205.226.729.064	6,99

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara per SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Perubahan PPAS Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

(Terlampir)

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.799.346.613.709	1.852.743.524.686	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	846.182.914.394	867.000.757.499	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	846.182.914.394	867.000.757.499	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	846.182.914.394	867.000.757.499	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	588.100.131.683	591.637.984.588	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	28.499.800	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	8.500.000	
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	19.999.800	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	579.256.906.083	580.415.445.188	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	578.470.986.083	579.629.525.188	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	780.000.000	780.000.000	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.920.000	5.920.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.250.000	72.980.000	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	104.250.000	72.980.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	426.129.900	426.129.900	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.922.400	160.922.400	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.207.500	265.207.500	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	2.230.973.280	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	2.230.973.280	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.807.870.700	7.903.981.420	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	851.709.000	947.819.720	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	654.471.700	654.471.700	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.301.690.000	6.301.690.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.975.000	559.975.000	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.200.000	32.575.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.150.000	209.775.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.400.000	227.400.000	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.225.000	90.225.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	257.000.951.361	274.280.941.561	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	116.543.466.200	118.070.514.813	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	625.513.000	625.513.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.773.410.100	4.287.450.100	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.062.132.800	6.006.132.800	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	411.244.497	411.244.497	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	413.074.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	990.000.003	1.020.580.003	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	4.705.974.750	2.370.220.750	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.418.422.300	8.061.112.300	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.250.000.000	3.566.594.997	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	75.129.300	75.129.300	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	642.727.300	847.047.300	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	19.680.451.050	17.493.856.053	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	231.681.100	241.681.100	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.676.780.000	72.650.878.613	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	81.298.473.878	83.343.737.195	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	400.782.750	400.782.750	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	547.789.950	547.789.950	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	438.893.300	629.893.300	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	186.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	159.000.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	255.000.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000	100.000.000	
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0	319.000.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	5.812.379.500	3.083.043.500	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	14.738.981.178	18.185.399.108	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	151.629.500	151.629.500	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	171.525.000	171.525.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	389.172.400	389.172.400	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.541.982.000	5.561.982.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	98.998.300	98.998.300	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	52.906.340.000	53.104.521.387	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29.110.935.539	31.202.115.509	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	433.192.000	533.192.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	210.709.600	210.709.600	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	22.000.000	22.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0	1.400.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.694.342.100	5.977.142.100	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.450.300.000	22.758.680.000	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	300.391.839	300.391.809	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.048.075.744	41.664.574.044	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	115.173.900	115.173.900	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14.437.500	14.437.500	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.668.584.344	36.240.202.644	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.249.880.000	5.294.760.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.081.831.350	1.081.831.350	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.081.831.350	1.081.831.350	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.081.831.350	1.081.831.350	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	713.425.559.936	696.168.659.022	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	331.244.265.397	327.093.175.799	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	230.571.789.440	231.689.512.641	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.604.775.159	92.826.350.283	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.861.150	81.576.088	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.062.350	21.757.350	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.798.800	59.818.738	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90.309.259.188	89.637.107.588	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86.557.627.588	86.547.627.588	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.731.391.600	3.069.240.000	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.240.000	20.240.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.100.365.287	1.437.744.618	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.837.450	22.954.700	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.062.587	143.296.318	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	209.552.000	236.694.850	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	524.019.000	765.037.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.198.250	37.611.750	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.056.000	7.056.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.640.000	225.094.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	364.053.134	650.351.989	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	364.053.134	650.351.989	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.866.400	351.900.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.866.400	351.900.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.370.000	667.670.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.250.000	328.550.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	200.000.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.120.000	139.120.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	135.296.041.832	134.462.382.373	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	34.128.509.219	44.239.154.720	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.300.000.000	4.680.000.000	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	8.463.859.809	26.251.268.210	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.573.788.000	497.121.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	3.384.603.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.439.771.300	3.552.193.100	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	9.351.090.110	5.873.969.410	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.021.983.513	88.494.539.553	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.685.581.286	551.839.700	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.411.329.186	878.199.200	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.688.941.800	885.201.800	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.714.649.650	121.244.650	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.907.898.000	108.923.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.004.497.600	430.204.800	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.112.898.750	292.098.750	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.375.408.414	190.599.100	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.448.104.350	1.429.160.250	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.146.099.167	239.593.567	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.979.584.400	2.413.226.800	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.020.364.850	705.679.850	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	154.906.564	7.831.835.564	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	439.223.075	255.571.875	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	696.284.275	380.369.075	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	297.342.950	297.403.000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	55.669.350	55.669.350	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	194.696.400	88.741.400	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.443.063.000	15.620.072.333	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	56.827.051.341	54.874.697.508	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	42.325.000	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	41.725.000	41.725.000	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	137.654.914	154.872.790	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	151.990.000	69.270.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000	0	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	85.019.191	84.015.191	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0	400.000.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	52.000.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	126.000.000	427.125.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	126.000.000	427.125.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.019.549.100	1.301.563.100	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	19.549.100	18.843.100	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.200.000.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	0	82.720.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.698.184.249	2.669.707.785	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.000.000	2.000.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.000.000	1.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	21.570.600	1.043.184.600	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.570.600	21.570.600	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	752.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	269.614.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.673.613.649	1.623.523.185	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.673.613.649	1.623.523.185	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	478.497.600	478.497.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.332.000	15.332.000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.332.000	15.332.000	
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	19.211.600	19.211.600	
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	5.735.750	5.735.750	
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	13.475.850	13.475.850	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	257.375.000	257.375.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	257.375.000	257.375.000	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.259.000	3.259.000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3.259.000	3.259.000	
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	500.000	500.000	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	500.000	500.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	182.820.000	182.820.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	182.820.000	182.820.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	494.290.600	1.252.574.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.450.000	150.103.800	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	71.450.000	150.103.800	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.373.600	155.373.600	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	155.373.600	155.373.600	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.467.000	947.097.200	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	267.467.000	947.097.200	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Bandarkedungmulyo	4.108.675.212	3.592.077.429	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.051.505.212	3.539.652.929	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.051.505.212	3.539.652.929	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.955.000	18.425.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.775.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.150.000	5.900.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.637.500	29.137.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28.965.000	0	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37.300.000	37.300.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.300.000	36.300.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.387.500	11.100.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	1.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	20.200.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	500.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.632.500	43.225.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	20.810.000	36.852.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56.737.000	6.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.100.000	49.455.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.900.000	20.800.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.200.000	2.200.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	36.950.000	77.950.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.400.000	1.400.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.676.405.712	3.159.807.929	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.200.000	2.200.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.170.000	52.424.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.170.000	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	57.170.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	52.424.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	52.424.500	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Bareng	5.960.304.304	5.512.056.089	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.868.359.304	5.488.756.089	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.868.359.304	5.488.756.089	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.150.000	64.947.900	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	44.589.850	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.950.000	14.200.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.700.000	24.700.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.125.000	5.200.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	29.450.000	29.550.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.550.000	10.050.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	5.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.200.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	64.700.000	114.982.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.850.000	14.350.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.250.000	4.200.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.100.000	62.437.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.500.000	4.500.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15.850.000	1.650.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15.500.000	67.300.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.507.994.454	5.059.788.189	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.300.000	1.300.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	800.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	91.945.000	23.300.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.945.000	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	91.945.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	23.300.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	23.300.000	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Bawangan Ploso	2.561.239.450	2.427.984.621	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.483.671.950	2.392.941.121	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.483.671.950	2.392.941.121	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.102.500	71.822.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.775.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.200.000	5.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.600.000	27.600.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.550.000	6.050.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35.375.000	35.375.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.900.000	3.900.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.800.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	6.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	600.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.350.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.450.000	52.575.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	46.670.000	27.500.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.068.500	12.750.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.200.000	67.617.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.750.000	2.600.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	600.000	100.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.975.000	66.800.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.133.705.950	2.001.051.121	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	77.567.500	35.043.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	77.567.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	77.567.500	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	35.043.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	35.043.500	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Blimbing Gudo	3.546.593.975	3.353.602.037	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.413.860.675	3.351.702.037	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.413.860.675	3.351.702.037	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.575.000	79.862.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.762.500	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.400.000	25.650.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.300.000	15.300.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.300.000	10.700.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.550.000	12.550.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.700.000	2.700.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000	10.800.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.000.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25.650.000	4.875.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.087.500	3.600.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.200.000	13.300.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.300.000	142.820.800	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39.600.000	10.000.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.800.000	1.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.600.000	67.300.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.128.235.675	2.935.243.737	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	12.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	132.733.300	1.900.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.733.300	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	132.733.300	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	1.900.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	1.900.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Blimbing Kesamben	1.613.714.000	1.565.465.509	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.552.846.500	1.498.540.509	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.552.846.500	1.498.540.509	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.817.500	68.715.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.680.000	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.050.000	10.050.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18.700.000	9.747.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.937.500	6.937.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.000.000	27.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	29.850.000	21.600.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	2.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.400.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	25.945.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.442.500	5.790.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.867.500	13.400.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18.800.000	72.310.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.534.800	2.200.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	10.013.000	10.013.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	70.207.500	60.334.800	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	600.000	600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.205.746.200	1.157.497.709	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000	600.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.867.500	66.925.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.867.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.867.500	0	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	66.925.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	66.925.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Brambang	2.121.249.300	2.107.592.081	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.121.249.300	2.088.942.081	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.121.249.300	2.088.942.081	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.900.000	36.300.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.800.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.900.000	46.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.950.000	13.950.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.700.000	8.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.625.000	16.625.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.400.000	4.400.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.900.000	16.400.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.000.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	300.000	300.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12.100.000	81.802.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.875.000	3.975.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.350.000	8.400.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	163.091.600	103.839.100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.450.000	2.100.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.500.000	7.500.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.100.000	33.750.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	300.000	300.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.702.007.700	1.698.250.481	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000	1.000.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	2.850.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	18.650.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	18.650.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	18.650.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Cukir	5.613.071.214	4.307.950.867	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.542.838.364	4.273.350.867	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.542.838.364	4.273.350.867	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.625.000	99.390.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	65.140.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	1.550.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.300.000	30.300.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.200.000	4.950.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.500.000	2.500.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.500.000	9.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	8.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.200.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.632.500	19.941.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.417.800	14.090.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.000.000	12.800.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	34.800.000	87.333.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.700.000	7.100.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	550.000	550.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	67.900.000	110.500.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	600.000	600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.167.773.064	3.862.645.867	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000	1.000.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	600.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70.232.850	34.600.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.232.850	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	70.232.850	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	34.600.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	34.600.000	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Dukuhklopo	2.377.546.188	2.172.845.460	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.302.533.688	2.113.977.960	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.302.533.688	2.113.977.960	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.212.500	42.837.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.275.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.450.000	2.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.800.000	12.800.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.250.000	4.100.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17.500.000	17.500.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.700.000	8.700.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.850.000	8.850.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.800.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	26.497.500	31.397.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.705.000	8.550.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.110.000	9.700.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	34.750.000	99.717.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.800.000	10.600.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	10.700.000	10.700.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	61.215.000	72.312.500	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.973.918.688	1.769.212.960	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.400.000	1.400.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	75.012.500	58.867.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.012.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75.012.500	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	58.867.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	58.867.500	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Gambiran	2.362.352.207	2.248.423.635	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.278.967.207	2.222.448.635	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.278.967.207	2.222.448.635	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73.900.000	65.175.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.025.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12.950.000	2.600.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.550.000	21.550.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.337.500	3.987.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.830.000	14.830.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.400.000	4.400.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.950.000	5.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	1.400.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.800.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	575.000	52.890.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.105.500	11.580.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.700.000	7.950.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	57.400.000	73.645.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.800.000	10.200.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33.025.000	107.050.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.947.619.207	1.838.690.635	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	1.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	83.385.000	25.975.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.385.000	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	83.385.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	25.975.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	25.975.000	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Jabon	1.487.635.867	1.475.903.637	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.400.822.767	1.405.110.037	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.400.822.767	1.405.110.037	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.329.650	33.526.100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.814.500	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.762.400	600.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.377.800	38.380.600	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.327.850	600.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.927.800	13.925.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.458.550	13.500.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	500.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.032.800	67.011.100	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.974.214	33.557.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	59.103.450	13.550.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10.099.800	56.322.200	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.308.200	1.500.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.438.850	54.449.800	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	500.000	500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.082.866.903	1.073.587.737	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	1.100.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	86.813.100	70.793.600	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.813.100	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	86.813.100	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	70.793.600	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	70.793.600	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Japanan	2.368.777.671	2.268.207.975	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.279.975.671	2.189.638.475	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.279.975.671	2.189.638.475	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.550.000	53.050.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	450.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	10.600.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.258.000	29.258.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.800.000	8.900.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.358.500	5.358.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.600.000	6.558.500	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.200.000	10.200.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	2.550.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.500.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.430.500	40.772.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.533.500	9.042.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	79.454.000	13.300.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15.006.500	81.993.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.943.000	2.300.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.574.500	58.958.500	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	800.000	800.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.954.517.171	1.854.397.475	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	1.600.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	88.802.000	78.569.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.802.000	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	88.802.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	78.569.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	78.569.500	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Jarakkulon	1.397.454.800	1.408.445.517	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.296.229.800	1.373.660.517	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.296.229.800	1.373.660.517	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	56.490.000	50.160.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	34.567.500	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.000.000	20.300.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.400.000	10.400.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5.100.000	4.400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.437.500	36.437.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.400.000	2.400.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.700.000	6.200.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	2.700.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.500.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000	1.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	31.675.000	34.365.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	2.400.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	47.725.000	21.100.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.100.000	101.225.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.550.000	17.500.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.200.000	4.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24.310.000	25.150.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.500.000	2.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	999.374.800	1.028.573.017	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000	1.200.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	1.250.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	101.225.000	34.785.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.225.000	0	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	101.225.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	34.785.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	34.785.000	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Jatiwates	1.587.997.000	1.491.086.438	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.511.852.000	1.439.151.438	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.511.852.000	1.439.151.438	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.940.000	39.600.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.900.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	8.800.000	5.600.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.687.500	23.687.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	23.050.000	18.250.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	44.800.000	44.800.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.600.000	2.600.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.850.000	12.650.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.650.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.100.000	1.100.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.700.000	21.440.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.320.000	4.300.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.573.800	2.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7.100.000	108.465.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.300.000	2.050.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	16.050.000	16.050.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.211.200	45.850.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.100.000	1.100.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.180.469.500	1.087.358.938	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.650.000	1.650.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	76.145.000	51.935.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.145.000	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	76.145.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	51.935.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	51.935.000	
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Jelakombo	1.993.738.674	2.020.638.485	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.959.712.174	1.978.649.685	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.959.712.174	1.978.649.685	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.410.000	111.640.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.660.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.600.000	18.600.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.500.000	11.100.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.000.000	1.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.400.000	4.400.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.750.000	2.350.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	4.850.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	16.800.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25.989.000	42.405.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.541.224	7.800.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	58.541.350	18.083.500	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.750.000	39.550.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.108.200	18.600.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.000.000	1.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	49.200.000	77.812.600	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	600.000	600.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.586.062.400	1.613.758.585	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.800.000	1.800.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	300.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.026.500	41.988.800	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.026.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	34.026.500	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	41.988.800	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	41.988.800	
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Jogoloyo	2.846.391.300	2.522.436.543	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.758.401.300	2.474.496.543	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.758.401.300	2.474.496.543	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.400.000	26.075.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.075.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.000.000	48.525.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.300.000	9.300.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.000.000	10.300.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.400.000	21.400.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000	3.000.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.500.000	6.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	500.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.500.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.375.000	42.240.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34.596.000	11.600.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.910.000	12.500.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.500.000	99.921.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.225.000	5.500.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.050.000	3.050.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80.795.100	40.200.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.000.000	1.410.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.430.375.200	2.111.475.543	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	18.600.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	87.990.000	47.940.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.990.000	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	87.990.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	47.940.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	47.940.000	
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Kabuh	3.782.319.332	3.588.993.029	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.782.319.332	3.521.543.029	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.782.319.332	3.521.543.029	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.474.800	74.850.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	33.600.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.600.000	2.200.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.151.150	23.151.300	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.062.500	4.600.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.800.000	8.800.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	1.650.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.500.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	42.237.500	52.475.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	44.600.000	46.200.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	77.010.000	15.260.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	73.302.200	49.937.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	43.750.000	10.750.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.100.000	5.100.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24.100.000	84.615.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.323.131.182	3.129.054.229	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000	500.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.800.000	8.800.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	67.450.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	67.450.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	67.450.000	
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Keboan	2.288.048.103	2.593.833.341	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.180.900.603	2.562.108.341	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.180.900.603	2.562.108.341	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.650.000	92.700.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.850.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.800.000	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.000.000	18.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.000.000	7.400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.250.000	19.250.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.200.000	2.200.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.200.000	6.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.000.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.000.000	1.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.375.000	17.575.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	11.950.000	11.950.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.100.000	4.700.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	35.450.000	107.147.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.200.000	4.000.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.050.000	4.050.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33.075.000	81.600.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.460.000	2.460.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.868.290.603	2.174.075.841	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	8.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	107.147.500	31.725.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	107.147.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	107.147.500	0	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	31.725.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	31.725.000	
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Kesamben	2.972.275.593	3.156.230.802	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.889.013.093	2.929.680.802	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.889.013.093	2.929.680.802	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.500.000	24.200.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.400.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6.400.000	3.200.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.000.000	21.300.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.000.000	1.750.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4.400.000	2.500.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000	6.050.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.900.000	9.250.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	4.700.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	3.200.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.400.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.425.000	16.175.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.950.000	11.400.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	47.850.000	9.820.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.200.000	0	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132.300.000	76.850.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.550.488.093	2.738.485.802	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	800.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	83.262.500	226.550.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.262.500	118.475.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	83.262.500	118.475.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	108.075.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	108.075.000	
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Kesamben Ngoro	2.659.849.366	2.172.225.628	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.637.191.166	1.922.910.628	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.637.191.166	1.922.910.628	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.362.500	19.437.500	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0	4.300.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.512.500	16.512.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.850.000	3.937.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.125.000	8.125.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.800.000	3.800.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.750.000	1.250.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	1.050.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.000.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.250.000	29.750.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.925.000	12.925.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.850.000	2.850.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	109.042.500	22.660.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.000.000	3.187.500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	151.875.000	28.300.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.251.848.666	1.764.225.628	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	600.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	22.658.200	249.315.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.658.200	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	22.658.200	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	249.315.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	249.315.000	
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Mayangan	3.907.653.557	3.838.032.308	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.839.811.057	3.788.892.308	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.839.811.057	3.788.892.308	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.912.500	103.382.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	44.595.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.450.000	500.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.085.000	18.085.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.155.000	8.295.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.482.500	5.482.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.600.000	6.600.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.255.000	4.950.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	20.835.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.200.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.600.000	18.685.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.437.500	7.737.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	44.070.000	19.650.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11.907.500	67.842.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	47.062.500	2.750.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.950.000	75.370.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.494.498.557	3.424.877.308	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	550.000	550.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	3.300.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	67.842.500	49.140.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.842.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	67.842.500	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	49.140.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	49.140.000	
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Megaluh	2.810.961.345	2.565.029.279	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.753.763.845	2.541.929.279	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.753.763.845	2.541.929.279	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67.700.000	75.975.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.775.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.900.000	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.150.000	19.150.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15.975.000	8.300.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.800.000	40.800.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000	7.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	48.600.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	66.797.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	62.762.500	66.162.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	40.445.000	23.245.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.600.000	0	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.100.000	49.100.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.400.000	3.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27.898.800	39.550.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.382.457.545	2.138.549.279	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000	200.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.800.000	3.500.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.197.500	23.100.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.197.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	57.197.500	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	23.100.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	23.100.000	
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Mojoagung	3.851.085.600	3.776.270.488	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.738.765.300	3.697.427.188	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.738.765.300	3.697.427.188	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.400.000	74.280.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	27.790.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.000.000	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.200.000	25.987.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3.500.000	2.750.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.600.000	5.250.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.400.000	16.400.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000	5.100.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.300.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.000.000	0	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.900.000	3.900.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	8.920.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.293.500	1.500.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.770.800	7.600.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.500.000	145.022.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.600.000	10.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73.250.000	41.700.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.419.561.000	3.344.717.188	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000	1.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	112.320.300	78.843.300	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.320.300	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	112.320.300	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	78.843.300	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	78.843.300	
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Mojowarno	4.037.762.799	4.270.618.578	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.037.762.799	4.210.793.578	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.037.762.799	4.210.793.578	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.025.000	105.650.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38.750.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.630.031	7.600.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.350.000	22.550.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	7.050.000	3.200.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.750.000	13.750.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.000.000	6.700.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.500.000	9.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	4.500.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.200.000	0	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	750.000	750.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	43.050.000	20.070.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.137.500	7.860.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	73.820.000	17.700.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	88.370.000	43.105.400	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	71.900.000	800.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	20.550.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.400.000	90.600.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	800.000	820.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.519.530.268	3.842.938.178	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000	200.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	9.500.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	59.825.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	59.825.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	59.825.000	
1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Perak	3.400.465.050	2.830.470.577	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.305.930.050	2.669.763.077	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.305.930.050	2.669.763.077	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.385.000	29.335.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.135.000	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.750.000	19.750.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.865.000	7.165.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.867.500	6.867.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.567.500	5.567.500	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	21.535.000	21.535.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.100.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	16.635.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.555.000	39.250.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.771.300	31.336.300	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	102.357.500	18.350.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.100.000	3.135.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	41.900.000	16.635.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.075.000	73.300.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.961.431.250	2.391.436.777	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	1.500.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	94.535.000	160.707.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.535.000	61.025.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	94.535.000	61.025.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	99.682.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	99.682.500	
1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Peterongan	4.042.672.184	3.562.507.424	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.938.130.184	3.458.052.724	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.938.130.184	3.458.052.724	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.125.000	33.225.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	24.000.000	24.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	700.000	700.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.050.000	43.050.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.350.000	21.250.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.375.000	10.375.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.300.000	3.300.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.300.000	13.300.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.300.000	6.300.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	16.162.500	16.162.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	51.348.500	51.348.500	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.000.000	16.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.700.000	32.700.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	7.087.500	7.087.500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.212.500	35.212.500	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	820.000	820.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.620.799.184	3.140.721.724	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.500.000	2.500.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	104.542.000	104.454.700	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.542.000	104.454.700	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	104.542.000	104.454.700	
1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Plandaan	2.850.220.625	3.186.517.345	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.718.590.625	3.110.142.345	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.718.590.625	3.110.142.345	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77.987.500	73.894.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.007.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.700.000	25.700.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.900.000	3.950.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.150.000	7.150.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000	4.800.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.950.000	9.850.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.100.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.987.500	16.187.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.375.000	11.075.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	73.850.000	16.050.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.850.000	131.630.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.800.000	4.300.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.875.000	56.050.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	800.000	800.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.406.858.625	2.745.105.345	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	131.630.000	76.375.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.630.000	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	131.630.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	76.375.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	76.375.000	
1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Plumbongambang	1.829.371.270	1.718.733.706	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.736.517.570	1.683.846.206	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.736.517.570	1.683.846.206	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.425.000	64.945.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.077.500	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18.600.000	13.500.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.700.000	23.747.500	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.200.000	11.000.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.510.000	9.510.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.600.000	3.600.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.200.000	10.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	960.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.100.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.900.000	40.686.200	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	17.320.000	9.950.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.187.500	24.200.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13.600.000	84.447.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.100.000	9.900.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.800.000	1.800.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.260.000	58.300.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.700.000	2.700.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.419.837.570	1.309.200.006	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5.400.000	5.400.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	92.853.700	34.887.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.853.700	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	92.853.700	0	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	34.887.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	34.887.500	
1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Pulolor	1.643.928.000	1.617.910.338	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.561.030.500	1.577.980.338	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.561.030.500	1.577.980.338	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.650.000	51.187.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.162.500	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.437.500	3.650.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.225.000	32.225.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37.317.500	16.862.500	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.400.000	8.400.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.000.000	4.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000	5.600.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	3.150.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.500.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.250.000	41.782.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.122.500	30.705.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.567.500	18.900.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15.550.000	77.350.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.750.000	5.800.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	8.442.500	8.442.500	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.814.000	52.701.500	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.050.000	2.050.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.237.091.500	1.211.073.838	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.700.000	1.700.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	2.400.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	82.897.500	39.930.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.897.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	82.897.500	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	39.930.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	39.930.000	
1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Pulorejo	3.986.406.239	3.580.806.956	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.931.936.239	3.506.006.956	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.931.936.239	3.506.006.956	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.800.000	28.700.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.600.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.200.000	39.100.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.200.000	40.200.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.200.000	9.100.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	28.000.000	28.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.000.000	12.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000	5.800.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	4.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.000.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.265.000	42.802.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.582.500	15.850.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.000.000	30.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17.500.000	35.565.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45.650.000	3.100.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.400.000	2.400.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90.100.000	45.650.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.560.238.739	3.154.639.456	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	8.900.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	54.470.000	74.800.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.470.000	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	54.470.000	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	74.800.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	74.800.000	
1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Sumobito	4.800.263.450	4.345.393.933	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.588.960.925	4.214.116.433	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.588.960.925	4.214.116.433	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	54.070.000	68.397.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38.447.500	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.200.000	21.000.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.300.000	25.300.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.850.000	8.300.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	9.790.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	1.500.000	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0	600.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.360.000	41.480.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	30.530.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.250.000	7.650.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.050.000	6.450.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0	1.100.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.600.000	71.750.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.600.000	1.510.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.368.233.425	3.911.758.933	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	300.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	5.350.000	
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0	1.350.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	211.302.525	131.277.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.302.525	119.077.500	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	211.302.525	119.077.500	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	12.200.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	12.200.000	
1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Tambakrejo	1.606.154.067	1.566.369.176	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.531.571.867	1.548.969.176	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.531.571.867	1.548.969.176	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60.065.000	59.525.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.925.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	59.400.000	4.350.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.000.000	21.800.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.400.000	2.400.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.150.000	45.550.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.400.000	6.400.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.100.000	4.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	1.500.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.300.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.825.000	60.940.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.077.500	0	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.550.000	21.050.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.100.000	89.659.700	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	43.950.000	1.900.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15.825.000	62.675.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.400.000	1.400.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.209.104.367	1.162.919.476	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000	2.000.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	400.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	74.582.200	17.400.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.582.200	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	74.582.200	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	17.400.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	17.400.000	
1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Tapen	2.979.637.100	2.782.742.292	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.863.692.099	2.689.877.492	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.863.692.099	2.689.877.492	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.262.500	35.087.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.675.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.650.000	5.750.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.000.000	28.850.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.012.500	4.600.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.412.500	10.412.500	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.650.000	1.650.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	2.850.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	10.400.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.000.000	48.560.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.200.000	12.237.500	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	84.977.300	16.300.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.450.000	77.410.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.150.000	10.650.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	10.200.000	10.200.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	51.537.500	55.100.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.552.614.799	2.355.719.992	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	1.500.000	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.100.000	12.100.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	115.945.001	92.864.800	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.945.001	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	115.945.001	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	92.864.800	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	92.864.800	
1.02.0.00.0.00.01.0033	Puskesmas Tembelang	2.950.112.515	2.954.798.925	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.879.583.215	2.936.636.425	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.879.583.215	2.936.636.425	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.750.000	59.237.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.087.500	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.000.000	2.200.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.825.000	36.825.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.550.000	12.150.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.500.000	10.500.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.000.000	22.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.500.000	4.500.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0	4.000.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.300.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.987.500	21.787.500	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.225.000	2.400.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.862.500	7.500.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	62.700.000	103.754.300	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34.850.000	6.900.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.600.000	1.600.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14.900.000	103.950.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.531.245.715	2.535.932.125	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	700.000	700.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	700.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70.529.300	18.162.500	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.529.300	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	70.529.300	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	18.162.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	18.162.500	
1.02.0.00.0.00.01.0034	Puskesmas Wonosalam	2.326.548.600	2.821.462.710	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.259.620.100	2.750.131.210	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.259.620.100	2.750.131.210	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.010.000	31.797.500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.625.000	0	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	14.250.000	1.200.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25.582.700	25.582.700	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.086.500	14.325.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.111.000	18.708.200	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.200.000	4.200.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.800.000	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.610.000	55.095.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	23.593.000	7.810.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	42.727.500	23.800.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	31.600.000	93.623.600	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.310.000	3.150.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	72.262.600	71.060.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	450.000	450.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.897.501.800	2.392.389.210	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000	900.000	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0	3.040.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	66.928.500	71.331.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.928.500	0	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	66.928.500	0	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	71.331.500	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	71.331.500	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	308.190.721.104	315.075.992.036	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	308.190.721.104	315.075.992.036	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.438.729.946	34.007.717.286	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.438.729.946	34.007.717.286	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.438.729.946	34.007.717.286	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	271.751.991.158	281.068.274.750	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000.000	4.700.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.000.000.000	4.700.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.751.991.158	276.368.274.750	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	267.751.991.158	276.368.274.750	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	73.990.573.435	53.999.491.187	
1.02.0.00.0.00.03.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	73.990.573.435	53.999.491.187	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.810.047.918	8.004.026.231	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.810.047.918	8.004.026.231	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.810.047.918	8.004.026.231	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.180.525.517	45.995.464.956	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.973.835.791	11.182.779.989	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	6.649.946.473	6.322.445.479	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.323.889.318	4.860.334.510	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.206.689.726	34.812.684.967	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	56.206.689.726	34.812.684.967	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	177.984.408.665	225.703.330.518	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.009.230.259	168.049.475.006	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.009.230.259	168.049.475.006	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.485.301.823	32.192.125.900	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.860.000	40.970.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.480.000	20.495.000	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.380.000	20.475.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.018.454.260	18.223.762.260	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.403.304.260	17.533.304.260	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	587.430.000	649.458.000	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.160.000	20.700.000	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.560.000	20.300.000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.100.000	12.000.000	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.100.000	12.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.974.772.563	5.142.558.563	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.417.500	19.458.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.119.000	168.944.800	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.904.400	25.904.400	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.609.323.100	4.719.242.800	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.002.900	43.002.900	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.660.663	9.660.663	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.345.000	156.345.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.372.026.000	5.616.402.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	597.646.000	842.022.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.774.380.000	4.774.380.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.058.089.000	3.156.433.077	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.527.000	31.527.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	583.128.000	596.314.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.984.000	2.062.992.150	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	251.450.000	465.599.927	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.396.501.325	7.537.343.647	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.396.501.325	7.537.343.647	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	312.813.525	672.741.130	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	326.200.000	326.200.000	
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	400.000.000	1.423.477.940	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.230.533.800	4.617.557.573	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	95.640.000	317.286.439	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	20.814.000	104.353.288	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	10.500.000	75.727.277	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	322.190.200	5.339.176.020	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	322.190.200	5.339.176.020	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	322.190.200	511.660.200	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0	4.177.589.980	
1.03.08.2.01.10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	0	649.925.840	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	599.999.905	10.599.999.905	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	599.999.905	10.599.999.905	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	599.999.905	10.599.999.905	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	93.150.768.456	109.291.221.944	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	93.150.768.456	109.291.221.944	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.268.531.912	2.344.677.282	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	599.969.985	1.860.085.053	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	33.956.143.862	38.622.380.939	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	17.036.049.844	17.036.049.844	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	17.898.166.454	19.006.896.064	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	12.483.816.183	20.513.042.546	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	9.908.090.216	9.908.090.216	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	173.517.850	668.235.390	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	68.220.400	165.181.400	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	68.220.400	165.181.400	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.500.000	126.047.540	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	10.500.000	126.047.540	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	8.109.600	58.663.600	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	8.109.600	58.663.600	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	86.687.850	318.342.850	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	86.687.850	318.342.850	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.880.950.700	2.421.372.200	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	118.329.000	155.953.000	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	118.329.000	155.953.000	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	843.676.000	1.049.026.000	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	843.676.000	1.049.026.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	733.799.500	867.867.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	663.565.000	789.832.500	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	70.234.500	78.034.500	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	185.146.200	348.526.200	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	185.146.200	348.526.200	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	49.075.178.406	55.753.855.512	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	49.075.178.406	55.753.855.512	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.991.082.700	21.181.082.700	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	20.991.082.700	21.181.082.700	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	214.000.950	214.000.950	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	11.770.246.000	11.770.246.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.100.000.000	1.100.000.000	
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	360.000.000	360.000.000	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.546.835.750	7.736.835.750	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	18.490.856.050	18.463.069.850	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.490.856.050	18.463.069.850	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	437.171.850	467.171.850	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	13.997.630.250	12.764.413.050	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	319.989.950	319.989.950	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.736.064.000	4.911.495.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.920.258.176	5.045.258.176	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.920.258.176	5.045.258.176	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	4.920.258.176	5.045.258.176	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.672.981.480	11.064.444.786	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.672.981.480	11.064.444.786	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.650.001.480	11.041.464.786	
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	22.980.000	22.980.000	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000.000	1.900.000.000	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000.000	1.900.000.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.900.000.000	1.900.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.900.000.000	1.900.000.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.900.000.000	1.900.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.650.608.972	19.723.672.275	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	18.650.608.972	19.723.672.275	
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Permukiman	18.650.608.972	19.723.672.275	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.826.375.172	6.639.338.475	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.252.500	14.252.500	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.102.500	5.102.500	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.150.000	9.150.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.018.278.922	5.161.603.846	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.527.412.246	4.527.412.246	
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	489.666.676	630.491.600	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	3.700.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	100.000.000	
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	100.000.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.597.276	618.483.346	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.478.072	8.977.680	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.612.910	43.000.071	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	189.966.011	235.740.191	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.538.300	186.303.900	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.761.833	32.225.354	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000	7.440.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.800.150	104.796.150	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.123.691	231.292.800	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.923.691	144.000.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.200.000	87.292.800	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.122.783	513.705.983	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.389.999	18.389.999	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.204.600	121.500.600	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.997.684	280.968.784	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.530.500	92.846.600	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.204.468.700	5.956.259.700	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.005.468.700	763.878.700	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1.005.468.700	763.878.700	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.199.000.000	5.192.381.000	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.519.000.000	3.722.381.000	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.680.000.000	1.470.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	950.624.100	1.140.624.100	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	950.624.100	1.140.624.100	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	207.500.000	487.500.000	
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	743.124.100	653.124.100	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.669.141.000	5.987.450.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.669.141.000	5.987.450.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.406.641.000	5.829.950.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	262.500.000	157.500.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.469.431.735	21.177.930.142	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	15.514.117.449	14.647.616.256	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	15.514.117.449	14.647.616.256	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.519.626.330	10.040.406.330	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.384.150	5.384.150	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.084.750	3.084.750	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.299.400	2.299.400	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.022.017.550	8.062.233.050	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.022.017.550	8.062.233.050	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.084.630	746.340.738	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.146.980	10.157.480	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.647.100	33.422.600	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	395.099.000	543.275.108	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.870.550	17.546.550	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	4.428.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.481.000	137.511.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	13.328.392	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	13.328.392	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.800.000	1.005.780.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.800.000	43.804.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	761.000.000	961.976.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.340.000	207.340.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000	38.500.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.130.000	153.130.000	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.710.000	15.710.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.994.491.119	4.607.209.926	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	356.858.819	1.354.603.819	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	191.958.469	211.958.469	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.681.550	50.681.550	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	23.591.350	23.591.350	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.870.000	992.615.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	68.224.000	68.224.000	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.533.450	7.533.450	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.637.632.300	3.252.606.107	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.460.260.100	2.597.242.007	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.900.000	30.900.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.171.472.200	624.464.100	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.955.314.286	6.530.313.886	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.955.314.286	6.530.313.886	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.551.774.285	2.727.847.285	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.140.000	6.140.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.510.000	3.510.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.630.000	2.630.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.604.770.100	1.605.920.100	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.467.350	1.503.467.350	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.112.500	100.262.500	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.190.250	2.190.250	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.178.788	241.971.788	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.778.888	9.778.888	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.146.900	22.050.900	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.637.000	8.637.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.722.500	96.422.500	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.580.500	12.580.500	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.665.000	2.220.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.648.000	90.282.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.120.009	639.560.009	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.600.009	120.200.009	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.520.000	519.360.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.565.388	234.255.388	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.900.000	40.900.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.610.000	111.610.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.055.388	81.745.388	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.186.117.801	2.370.569.401	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	403.350.000	403.350.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	241.550.000	241.550.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	161.800.000	161.800.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.431.417.800	1.691.489.400	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.429.567.800	1.690.989.400	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.850.000	500.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	351.350.001	275.730.001	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	82.000.001	82.000.001	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	269.350.000	193.730.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.217.422.200	1.431.897.200	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.217.422.200	1.431.897.200	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.217.422.200	1.431.897.200	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	21.633.690.007	22.969.175.230	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	21.633.690.007	22.969.175.230	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	21.633.690.007	22.969.175.230	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.313.036.407	4.469.744.608	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.976.800	4.976.800	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.861.800	2.861.800	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.115.000	2.115.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.494.724.207	3.568.804.207	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.355.813.407	3.425.813.407	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	137.916.000	141.996.000	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	394.800	394.800	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	600.000	600.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.964.200	180.781.201	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.615.000	8.597.600	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.032.300	123.248.300	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.897.900	12.647.900	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.387.000	5.168.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.032.000	31.119.401	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	19.482.200	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	19.482.200	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.587.000	490.681.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.200.000	109.200.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.387.000	381.481.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.784.200	205.019.200	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.978.800	26.506.300	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.937.200	52.144.700	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.008.200	104.008.200	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.860.000	22.360.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.275.016.300	1.845.763.100	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.590.100	8.590.100	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8.590.100	8.590.100	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.266.426.200	1.837.173.000	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	156.129.900	156.129.900	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.411.000	115.411.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.404.500	7.404.500	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	984.252.600	1.552.252.600	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3.228.200	5.975.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.327.312.000	1.371.595.800	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.295.793.500	1.336.990.900	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	1.119.223.900	1.119.223.900	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	13.400.000	13.400.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	20.000.000	20.000.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.404.000	22.404.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	120.765.600	140.463.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0	21.500.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	31.518.500	34.604.900	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0	3.086.400	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	26.118.500	26.118.500	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.400.000	5.400.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.347.242.100	14.860.097.322	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.347.242.100	14.860.097.322	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	290.315.100	290.315.100	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.563.500	8.563.500	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	13.026.593.500	13.539.448.722	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.021.770.000	1.021.770.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	166.087.300	191.727.300	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	117.586.800	120.681.800	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	93.617.400	93.617.400	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	8.000.000	8.000.000	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	7.971.500	7.971.500	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	7.997.900	7.997.900	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	0	3.095.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	48.500.500	71.045.500	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	4.390.000	8.935.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	44.110.500	62.110.500	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	204.995.900	230.247.100	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	204.995.900	230.247.100	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	204.995.900	230.247.100	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	163.653.947.472	184.647.081.849	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.729.526.949	6.554.721.619	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	5.729.526.949	6.554.721.619	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	5.729.526.949	6.554.721.619	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.932.393.499	4.039.124.149	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.157.200	3.157.200	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.836.250	2.836.250	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	320.950	320.950	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.497.173.814	3.517.996.314	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.385.114	3.372.385.114	
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.235.000	145.057.500	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	276.850	276.850	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	276.850	276.850	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.843.950	218.304.100	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.460.000	3.460.000	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.782.600	20.782.600	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.218.800	89.160.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.078.550	18.871.500	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.704.000	19.704.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.600.000	66.326.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.477.885	49.477.885	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.477.885	49.477.885	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.560.000	145.014.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000	45.600.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.560.000	99.414.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.180.650	105.174.650	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000	34.058.800	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.480.950	16.480.950	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	14.935.200	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.699.700	39.699.700	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	652.733.500	898.332.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	600.000.000	845.599.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	525.000.000	770.599.000	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	75.000.000	75.000.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.984.850	17.984.850	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.984.850	17.984.850	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.449.800	2.449.800	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	2.449.800	2.449.800	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	3.633.100	3.633.100	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	3.633.100	3.633.100	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.665.750	28.665.750	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	28.665.750	28.665.750	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	373.514.700	426.379.470	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	282.429.050	306.437.950	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	3.111.450	3.111.450	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	13.057.200	13.057.200	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	14.134.400	29.438.400	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	252.126.000	260.830.900	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	68.707.800	77.828.520	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	7.699.300	7.699.300	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	61.008.500	70.129.220	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	22.377.850	42.113.000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	14.316.950	34.052.100	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	8.060.900	8.060.900	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	770.885.250	1.190.885.500	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.358.300	150.514.100	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.261.350	15.261.350	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	19.147.200	0	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	11.949.750	135.252.750	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	724.526.950	1.040.371.400	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.379.850	41.379.850	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.911.000	10.911.000	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	376.300	376.300	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	36.999.750	75.744.200	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	661.860.050	911.960.050	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.203.605.750	1.253.723.750	
2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.203.605.750	1.253.723.750	
2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.203.605.750	1.253.723.750	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.699.750	3.699.750	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.699.750	3.699.750	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.699.750	3.699.750	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	737.418.550	787.418.550	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	107.863.000	107.863.000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	60.308.400	60.308.400	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	36.725.600	36.725.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.829.000	10.829.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.509.000	133.509.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	83.509.000	133.509.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	546.046.550	546.046.550	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	546.046.550	546.046.550	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	161.397.400	161.019.188	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	102.316.000	102.316.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.316.000	102.316.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	46.283.400	45.905.188	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.899.900	17.083.188	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.383.500	28.822.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.798.000	12.798.000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.798.000	12.798.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	172.089.050	172.089.050	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.416.250	144.416.250	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	46.899.250	46.899.250	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	97.517.000	97.517.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27.672.800	27.672.800	
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.672.800	27.672.800	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	129.001.000	129.497.212	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	38.973.500	38.973.500	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.973.500	38.973.500	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.243.000	55.739.212	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.299.000	19.938.212	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	18.944.000	35.801.000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.784.500	34.784.500	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.784.500	34.784.500	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.098.693.268	6.734.018.268	
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.098.693.268	6.734.018.268	
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.098.693.268	6.734.018.268	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.374.832.738	5.510.506.038	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.424.200	11.104.200	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.134.100	4.234.100	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.290.100	6.870.100	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.621.349.060	4.618.989.060	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.476.885.860	4.476.885.860	
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.210.000	141.210.000	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.049.000	329.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.204.200	564.200	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	500.000	500.000	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	500.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.797.530	312.207.730	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.268.130	4.268.130	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.451.700	45.860.500	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.685.000	4.685.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.866.800	148.866.200	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.189.500	9.189.500	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.220.000	28.220.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.116.400	71.118.400	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.852.048	27.956.448	
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.852.048	27.956.448	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.816.000	345.816.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	120.000.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.816.000	225.816.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.093.900	193.932.600	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.574.000	24.574.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	30.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.519.900	103.358.600	
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.000.000	36.000.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	146.000.000	591.000.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	146.000.000	591.000.000	
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	146.000.000	591.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	469.908.250	489.559.950	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	101.949.100	221.600.800	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	26.917.750	55.877.750	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	16.247.550	76.939.550	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	18.701.400	18.701.400	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	40.082.400	40.082.400	
2.09.03.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	29.999.700	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	367.959.150	267.959.150	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	70.795.400	70.795.400	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	297.163.750	197.163.750	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	13.764.100	48.764.100	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	3.917.900	3.917.900	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	3.917.900	3.917.900	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.846.200	44.846.200	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	9.846.200	44.846.200	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	94.188.180	94.188.180	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	94.188.180	94.188.180	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	94.188.180	94.188.180	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	412.198.200	612.957.020	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	412.198.200	612.957.020	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	412.198.200	612.957.020	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	312.938.500	328.872.600	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	312.938.500	328.872.600	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	312.938.500	328.872.600	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	99.259.700	284.084.420	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	99.259.700	284.084.420	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	99.259.700	284.084.420	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.298.700.518	32.160.785.955	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	28.298.700.518	32.160.785.955	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	28.298.700.518	32.160.785.955	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.014.467.817	17.484.467.385	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.027.900	29.912.900	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.291.900	18.346.900	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.736.000	11.566.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.766.747.267	5.766.747.267	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.542.571.267	5.542.571.267	
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	215.922.000	215.922.000	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.254.000	8.254.000	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.500.000	45.500.000	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.500.000	45.500.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.133.168.630	5.120.123.030	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.447.550	76.447.200	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.176.300	61.175.900	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.887.740.680	4.780.790.030	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.120.100	42.244.700	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.000	2.220.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.244.000	157.245.200	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	502.823.712	
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	502.823.712	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.731.868.000	3.694.668.800	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.958.168.000	2.910.168.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	773.700.000	784.500.800	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.315.156.020	2.324.691.676	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.294.600	40.294.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.232.731.420	1.623.284.012	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	581.433.064	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.130.000	79.680.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.186.794.150	2.906.244.093	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.467.908.750	1.851.400.493	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	639.970.300	569.970.500	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	251.712.000	251.712.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	576.226.450	1.029.717.993	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	718.885.400	1.054.843.600	
2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	525.937.400	704.362.400	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	192.948.000	350.481.200	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.925.183.300	2.489.522.200	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.925.183.300	2.489.522.200	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	209.748.200	229.527.100	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.703.045.100	2.247.605.100	
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12.390.000	12.390.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	270.482.000	549.396.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270.482.000	549.396.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	176.071.000	349.483.000	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.411.000	199.913.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	207.447.300	243.667.300	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.447.300	243.667.300	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	69.986.500	79.956.500	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	31.015.000	31.015.000	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	106.445.800	132.695.800	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	91.179.701	95.181.701	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	91.179.701	95.181.701	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	91.179.701	95.181.701	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.603.146.250	8.392.307.276	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	6.603.146.250	8.392.307.276	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	583.446.000	769.062.400	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.748.693.900	6.294.238.626	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	670.922.350	710.922.250	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	600.084.000	618.084.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.863.234.379	9.204.468.879	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.863.234.379	9.204.468.879	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.863.234.379	9.204.468.879	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.508.403.876	8.287.025.876	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.648.200	29.798.200	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.011.000	9.011.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.637.200	20.787.200	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.609.722.430	4.597.872.430	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.461.872.130	4.461.872.130	
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140.940.000	129.090.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.910.300	6.910.300	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.634.657.946	2.050.336.163	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.600	6.000.600	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.037.417.518	1.456.828.517	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.864.999	153.864.999	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	216.598.233	212.865.451	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.704.000	4.704.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.072.596	216.072.596	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	239.534.983	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	239.534.983	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.900.000	893.900.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.000.000	38.000.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.800.000	208.800.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	647.100.000	647.100.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.475.300	475.584.100	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.110.000	42.110.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.400.000	119.400.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	44.980.500	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	185.965.300	269.093.600	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	114.100.000	114.100.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	114.100.000	114.100.000	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	42.000.000	42.000.000	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	62.100.000	62.100.000	
2.12.02.2.01.06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10.000.000	10.000.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.940.303	89.940.303	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	4.011.997	4.011.997	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.530.000	1.530.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.481.997	2.481.997	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	85.928.306	85.928.306	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	85.928.306	85.928.306	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	145.006.200	707.618.700	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	49.509.200	49.509.200	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	27.870.600	27.870.600	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	21.638.600	21.638.600	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	77.486.600	640.099.100	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	18.504.600	18.504.600	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.982.000	621.594.500	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18.010.400	18.010.400	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.278.000	13.278.000	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4.732.400	4.732.400	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.784.000	5.784.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	5.784.000	5.784.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	5.784.000	5.784.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.518.344.710	10.174.469.710	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.518.344.710	10.174.469.710	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.518.344.710	10.174.469.710	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.108.739.860	6.203.178.810	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.504.000	28.544.000	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.420.000	11.100.000	
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.084.000	17.444.000	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.164.403.280	5.178.087.280	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.997.261.280	4.997.261.280	
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.142.000	180.826.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.320.000	7.320.000	
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.320.000	7.320.000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.181.454	359.519.704	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.543.880	13.543.880	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.626.200	48.626.200	
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.603.000	46.603.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.744.374	117.744.374	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.046.000	4.871.850	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000	3.060.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.898.000	125.070.400	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	76.966.900	
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	76.966.900	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.900.000	419.900.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.500.000	103.500.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.000.000	181.000.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.400.000	135.400.000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.431.126	132.840.926	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.398.600	73.999.100	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.354.400	38.663.700	
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.678.126	20.178.126	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	45.951.500	45.951.500	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	45.951.500	45.951.500	
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	45.951.500	45.951.500	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	27.977.000	27.977.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	27.977.000	27.977.000	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15.800.000	15.800.000	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	7.014.000	7.014.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5.163.000	5.163.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	710.419.850	3.242.504.300	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	710.419.850	3.242.504.300	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	7.597.000	6.937.600	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	164.380.000	244.380.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	24.984.800	1.984.429.700	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	28.383.500	32.776.570	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	7.402.400	7.402.400	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.600.000	4.600.000	
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4.330.000	4.330.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	25.015.000	27.670.000	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	203.964.000	199.570.930	
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	188.669.550	671.845.000	
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	14.600.000	14.600.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36.493.600	43.962.100	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	625.256.500	654.858.100	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	625.256.500	654.858.100	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	103.155.700	389.649.900	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	95.000.000	145.000.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	21.632.500	20.320.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10.998.100	10.125.000	
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	394.470.200	89.763.200	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.911.114.953	20.110.762.375	
2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.911.114.953	20.110.762.375	
2.14.2.08.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.911.114.953	20.110.762.375	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.809.889.303	5.829.771.303	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.240.000	16.240.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.740.000	5.965.000	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.500.000	10.275.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.551.434.803	4.551.434.803	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.551.434.803	4.551.434.803	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.160.500	360.578.500	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.058.200	2.058.200	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.828.300	53.828.300	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.134.000	196.622.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.995.000	7.995.000	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000	3.720.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.425.000	96.355.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.076.000	638.540.000	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.080.000	106.920.000	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.996.000	529.620.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.978.000	262.978.000	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.576.000	121.576.000	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.552.000	78.552.000	
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.850.000	62.850.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	496.355.200	541.355.200	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	496.355.200	541.355.200	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	109.200.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	79.355.200	79.355.200	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	256.800.000	256.800.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000	96.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.247.791.600	6.382.557.022	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.108.395.800	1.263.161.222	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000	274.765.422	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	15.662.200	15.662.200	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	194.933.600	194.933.600	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	273.000.000	273.000.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	424.800.000	424.800.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.259.474.500	1.259.474.500	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	622.800.000	622.800.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	636.674.500	636.674.500	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.297.421.300	3.277.421.300	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000	56.700.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.504.653.300	1.484.653.300	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5.000.000	5.000.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.700.168.000	1.700.168.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.900.000	30.900.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	582.500.000	582.500.000	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	9.000.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	573.500.000	573.500.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.357.078.850	7.357.078.850	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.964.314.000	6.964.314.000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	360.000.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.394.500.000	6.394.500.000	
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	144.000.000	144.000.000	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	65.814.000	65.814.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	392.764.850	392.764.850	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	392.764.850	392.764.850	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.112.792.483	40.582.154.222	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	36.112.792.483	40.582.154.222	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	36.112.792.483	40.582.154.222	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.980.015.305	28.890.506.686	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.554.760	110.975.760	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.914.760	98.255.760	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.640.000	12.720.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.812.626.535	8.912.806.535	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.419.696.935	8.419.696.935	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	381.894.800	482.074.800	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.098.800	5.098.800	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.936.000	5.936.000	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.953.900	3.953.900	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.953.900	3.953.900	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.692.000	295.692.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	295.692.000	295.692.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.306.577.325	1.466.654.606	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.203.325	43.123.325	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.324.900	137.137.100	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.048.900	85.048.900	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	767.613.000	841.753.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	217.983.200	203.393.281	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.760.000	11.760.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.644.000	144.439.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.469.000	586.341.700	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	117.420.000	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.469.000	468.921.700	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.563.466.005	16.563.466.005	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.217.498.005	15.217.498.005	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.345.968.000	1.345.968.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.675.780	950.616.180	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.698.830	17.374.500	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	589.685.000	584.879.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.334.950	258.405.680	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.957.000	89.957.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.132.777.178	11.691.647.536	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.151.017.453	7.771.611.051	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.512.814.500	5.429.463.294	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	24.999.000	31.256.800	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.613.203.953	2.310.890.957	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	58.212.500	108.799.120	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	58.212.500	108.799.120	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.121.455.000	2.425.623.700	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.121.455.000	2.425.623.700	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	457.074.825	520.163.725	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250.000.000	125.000.000	
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	76.544.825	264.971.925	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	130.530.000	130.191.800	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	29.607.500	97.002.500	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.099.700	70.594.900	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	21.160.000	21.160.000	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3.347.800	5.247.600	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	6.174.600	20.024.600	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4.074.600	17.924.600	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2.100.000	2.100.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	225.362.500	535.250.200	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	225.362.500	535.250.200	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.872.800	213.172.640	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	83.872.800	213.172.640	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.753.943.859	14.173.982.012	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.753.943.859	14.173.982.012	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.753.943.859	14.173.982.012	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.305.655.309	7.276.209.962	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.560.000	27.560.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.060.000	11.060.000	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.500.000	16.500.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.141.765.824	5.125.385.824	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.927.422.324	4.927.422.324	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	209.586.000	193.206.000	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.757.500	4.757.500	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.450.685	392.868.885	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.805.635	13.805.635	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.246.000	58.219.600	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.383.900	163.279.400	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.753.750	48.520.850	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.496.000	11.496.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.765.400	97.547.400	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.589.800	613.007.300	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.000.000	325.000.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284.589.800	288.007.300	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.289.000	1.117.387.953	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.110.000	42.110.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.550.000	120.150.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.199.000	517.365.202	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.430.000	437.762.751	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.237.677.550	3.003.861.050	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.237.677.550	3.003.861.050	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	375.502.500	698.967.500	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	160.779.008	173.377.708	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.596.686.000	2.008.730.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	104.710.042	122.785.242	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.210.611.000	3.893.911.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.554.238.000	2.495.938.000	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.300.000	16.300.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.537.938.000	2.479.638.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.656.373.000	1.397.973.000	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	211.306.800	271.106.800	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	784.941.000	495.241.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	660.125.200	631.625.200	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.741.506.676	5.617.798.976	
2.17.2.17.2.17.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.741.506.676	5.617.798.976	
2.17.2.17.2.17.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.741.506.676	5.617.798.976	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.664.080.776	3.676.292.131	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.910.500	13.771.000	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.306.600	6.563.200	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.603.900	7.207.800	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.076.927.276	2.884.922.931	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.988.860.426	2.767.820.581	
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.946.500	107.982.000	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.655.000	4.655.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.465.350	4.465.350	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.733.700	363.172.700	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.792.000	10.618.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.997.200	166.287.400	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.600.000	96.720.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.761.500	28.874.300	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.852.000	8.852.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.731.000	51.821.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.392.000	212.532.000	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000	102.000.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.192.000	109.332.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.117.300	201.893.500	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.687.000	40.548.000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.440.300	80.995.500	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.990.000	80.350.000	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	56.848.950	86.848.950	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.848.950	86.848.950	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.848.950	86.848.950	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	51.355.200	81.355.200	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	51.355.200	81.355.200	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	51.355.200	81.355.200	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	50.038.350	103.734.295	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.038.350	103.734.295	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50.038.350	103.734.295	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	191.249.400	226.634.400	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	191.249.400	226.634.400	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	191.249.400	226.634.400	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	489.810.750	1.137.309.750	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	489.810.750	1.137.309.750	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000	59.690.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	235.150.800	914.070.800	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	224.659.950	163.548.950	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	238.123.250	305.624.250	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	238.123.250	305.624.250	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	238.123.250	305.624.250	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.563.279.359	9.802.239.321	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.563.279.359	9.802.239.321	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.563.279.359	9.802.239.321	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.302.605.409	7.368.065.621	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.655.500	76.655.250	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.277.500	29.277.500	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.378.000	47.377.750	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.892.793.409	4.884.553.409	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.703.995.409	4.703.995.409	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.798.000	180.558.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.792.600	647.317.650	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.034.000	8.034.000	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.028.000	124.678.800	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.496.000	3.496.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.943.500	223.043.500	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.883.100	95.081.350	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.100.000	43.100.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.308.000	149.884.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	527.810.000	541.616.000	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	527.810.000	541.616.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.234.000	608.954.000	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.960.000	177.480.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.474.000	429.674.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.319.900	608.969.312	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.110.000	41.110.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.426.674	121.426.674	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	309.183.226	309.183.226	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.600.000	137.249.412	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	340.882.500	245.882.500	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	340.882.500	245.882.500	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	340.882.500	245.882.500	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	892.379.550	1.065.879.550	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	892.379.550	1.065.879.550	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	892.379.550	1.065.879.550	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	301.253.400	326.253.150	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	301.253.400	326.253.150	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	254.649.400	279.649.150	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	27.289.100	27.289.100	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	19.314.900	19.314.900	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	422.539.500	457.539.500	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	422.539.500	457.539.500	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	24.838.000	24.838.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	53.401.500	88.401.500	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	344.300.000	344.300.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	303.619.000	338.619.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303.619.000	338.619.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	303.619.000	338.619.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	14.968.982.508	17.689.302.232	
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	14.968.982.508	17.689.302.232	
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	14.968.982.508	17.689.302.232	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.364.001.643	7.239.369.788	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.773.700	35.773.700	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.772.500	14.772.500	
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.001.200	21.001.200	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.773.487.988	4.773.487.988	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.639.168.988	4.639.168.988	
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.818.000	127.818.000	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.865.000	2.865.000	
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.636.000	3.636.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.099.755	509.275.900	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.313.055	75.764.700	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.613.950	81.291.450	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.552.500	224.927.500	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.990.750	40.990.750	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.852.000	29.352.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.777.500	56.949.500	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	320.618.700	
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	320.618.700	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.024.370.000	1.108.370.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.000.000	349.200.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	742.370.000	759.170.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.270.200	491.843.500	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.570.000	9.570.000	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.750.200	145.955.100	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	306.368.400	
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.950.000	29.950.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	504.936.620	948.634.070	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	458.173.300	887.870.750	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	19.359.400	44.359.400	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	438.813.900	843.511.350	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.763.320	60.763.320	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	16.841.820	30.841.820	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	29.921.500	29.921.500	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.700.044.245	8.701.857.374	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.472.231.945	1.772.002.474	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	48.682.500	48.682.500	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.423.549.445	1.723.319.974	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.953.061.200	3.148.301.800	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3.953.061.200	3.148.301.800	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.046.858.600	2.846.858.600	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.046.858.600	2.846.858.600	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	227.892.500	934.694.500	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	227.892.500	934.694.500	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000	799.441.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000	799.441.000	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000	799.441.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	331.450.000	442.623.750	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	331.450.000	442.623.750	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	331.450.000	442.623.750	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	331.450.000	442.623.750	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	331.450.000	442.623.750	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	231.204.000	231.204.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	100.246.000	211.419.750	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	135.938.900	235.438.800	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	135.938.900	235.438.800	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	135.938.900	235.438.800	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	135.938.900	235.438.800	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	135.938.900	235.438.800	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	135.938.900	235.438.800	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.261.612.500	4.498.612.500	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.261.612.500	4.498.612.500	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.261.612.500	4.498.612.500	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.332.497.900	1.472.497.900	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.332.497.900	1.472.497.900	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.332.497.900	1.472.497.900	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.528.146.000	2.625.146.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.528.146.000	2.625.146.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	291.896.000	291.896.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.236.250.000	2.333.250.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	400.968.600	400.968.600	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	400.968.600	400.968.600	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	400.968.600	400.968.600	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	380.206.550	512.048.799	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	380.206.550	512.048.799	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	380.206.550	512.048.799	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	380.206.550	512.048.799	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	268.260.100	341.640.349	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.056.700	161.954.700	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	16.878.800	16.470.800	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	89.324.600	163.214.849	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.946.450	170.408.450	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	54.043.450	112.353.450	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	57.903.000	58.055.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.368.815.910	4.286.973.661	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.368.815.910	4.286.973.661	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.368.815.910	4.286.973.661	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.475.789.810	3.838.909.561	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.590.800	10.797.050	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.142.800	3.142.800	
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.448.000	7.654.250	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.082.690.200	3.071.800.200	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.987.591.500	2.987.591.500	
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.074.000	83.184.000	
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	577.400	577.400	
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	447.300	447.300	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.464.629	185.993.100	
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.065.000	3.299.000	
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.324.029	17.942.500	
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.059.200	13.059.200	
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.450.400	86.250.400	
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.402.000	7.858.000	
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.812.000	55.232.000	
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.451.821	299.643.692	
2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.451.821	299.643.692	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.440.000	137.640.000	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.000.000	58.200.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.440.000	79.440.000	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.152.360	133.035.519	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.711.800	35.711.800	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.499.560	46.624.719	
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.741.000	32.309.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.200.000	18.390.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	887.788.800	442.826.800	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	876.572.300	431.610.300	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	502.970.400	296.310.100	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	373.601.900	135.300.200	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	11.216.500	11.216.500	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	11.216.500	11.216.500	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	5.237.300	5.237.300	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	5.237.300	5.237.300	
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.237.300	5.237.300	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	78.058.464.805	92.188.716.471	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.873.927.600	1.968.550.000	
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.873.927.600	1.968.550.000	
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.873.927.600	1.968.550.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	72.124.200	72.124.200	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	68.220.200	68.220.200	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3.546.200	3.546.200	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	64.674.000	64.674.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.904.000	3.904.000	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.904.000	3.904.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.539.327.550	1.559.232.050	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	114.892.500	134.797.000	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	99.520.400	119.424.900	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	15.372.100	15.372.100	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.424.435.050	1.424.435.050	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	147.338.600	147.338.600	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.264.903.450	1.264.903.450	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.193.000	12.193.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	262.475.850	337.193.750	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	262.475.850	337.193.750	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	262.475.850	337.193.750	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.995.935.089	2.299.816.814	
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.995.935.089	2.299.816.814	
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.995.935.089	2.299.816.814	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.341.594.357	1.188.729.532	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.331.705.599	1.178.840.774	
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	299.758.200	299.758.200	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	917.453.099	565.384.674	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.901.350	10.901.350	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	103.592.950	302.796.550	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	9.888.758	9.888.758	
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	9.888.758	9.888.758	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	475.651.282	811.588.332	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	475.651.282	811.588.332	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	370.434.132	525.619.032	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	105.217.150	285.969.300	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	178.689.450	299.498.950	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	138.104.700	178.914.400	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	138.104.700	178.914.400	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	40.584.750	120.584.550	
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40.584.750	120.584.550	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	47.844.034.903	54.108.220.877	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	39.088.651.879	43.616.500.653	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	39.088.651.879	43.616.500.653	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.687.868.109	21.566.165.590	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.760.850	20.760.850	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.291.500	7.291.500	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.469.350	13.469.350	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.235.952.090	18.235.952.090	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.013.684.340	18.013.684.340	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	219.978.000	219.978.000	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.289.750	2.289.750	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.600.000	16.600.000	
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.600.000	16.600.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	995.746.200	1.048.675.800	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.880.400	20.880.400	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.446.800	244.757.000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	711.760.000	582.837.400	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.831.000	29.731.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.056.000	84.800.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.772.000	85.670.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	570.000.000	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	570.000.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.488.000	1.003.880.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.488.000	205.488.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	760.000.000	798.392.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.320.969	670.296.850	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.183.400	40.183.400	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.321.669	246.202.550	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.165.900	332.260.900	
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.650.000	51.650.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.194.536.505	9.847.278.024	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.194.536.505	9.847.278.024	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.611.750.405	7.418.382.205	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.582.786.100	2.428.895.819	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.935.940.695	8.280.454.669	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.763.467.700	2.016.038.100	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1.718.530.700	1.768.541.200	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	44.937.000	247.496.900	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	5.172.472.995	6.264.416.569	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	330.000.000	1.842.546.615	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.515.000.000	4.120.455.954	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	0	301.414.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.327.472.995	0	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	378.441.000	378.441.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	378.441.000	378.441.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	274.897.500	274.897.500	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	27.168.500	27.168.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	76.375.000	76.375.000	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	30.040.600	77.021.600	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.040.600	77.021.600	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	30.040.600	77.021.600	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.861.824.970	3.467.139.770	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.861.824.970	3.467.139.770	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.202.723.370	1.346.323.370	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.526.596.850	1.669.631.350	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	12.682.750	130.113.050	
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	12.111.100	12.111.100	
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	107.710.900	308.960.900	
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	8.755.383.024	10.491.720.224	
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	8.755.383.024	10.491.720.224	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.679.411.462	7.054.366.282	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.073.700	19.723.700	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.694.050	9.344.050	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.379.650	10.379.650	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.669.489.453	5.674.455.953	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.547.542.603	5.547.542.603	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.230.000	120.196.500	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.821.700	2.821.700	
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.895.150	3.895.150	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000	1.000.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.639.309	491.453.909	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.497.620	15.497.620	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.102.889	84.987.889	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.998.800	261.140.400	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.342.000	26.342.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.056.000	38.056.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.642.000	65.430.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	243.859.788	
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	23.589.498	
3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	75.220.374	
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	145.049.916	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.400.000	340.440.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	120.180.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.400.000	220.260.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.809.000	283.432.932	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.010.000	40.010.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.369.000	169.889.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	35.448.780	
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.430.000	38.085.152	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	454.004.776	1.840.208.776	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.435.500	34.435.500	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	34.435.500	34.435.500	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	419.569.276	1.805.773.276	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	419.569.276	1.805.773.276	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	90.221.217	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	0	90.221.217	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	0	90.221.217	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.598.121.336	1.465.750.499	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	289.970.292	227.179.055	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	289.970.292	227.179.055	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	752.875.000	752.875.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	752.875.000	752.875.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	375.944.081	279.164.481	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	335.239.631	222.386.031	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	40.704.450	56.778.450	
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	179.331.963	206.531.963	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	179.331.963	206.531.963	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	23.845.450	41.173.450	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	23.845.450	41.173.450	
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	23.845.450	41.173.450	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	25.263.438.169	31.869.246.634	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.263.438.169	31.869.246.634	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.263.438.169	31.869.246.634	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.753.541.229	10.938.514.410	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.053.700	16.705.081	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.387.650	6.494.031	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.666.050	10.211.050	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.979.689.929	9.002.566.929	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.646.246.179	8.691.129.679	
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	331.944.000	309.937.500	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.950	999.950	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	499.800	499.800	
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.493.800	993.800	
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.493.800	993.800	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	635.861.600	824.813.200	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.212.400	47.633.700	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.768.500	65.758.000	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.041.750	228.583.150	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	273.390.950	273.390.950	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.128.000	115.128.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.320.000	94.319.400	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.067.200	731.430.400	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.000.000	304.000.000	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.067.200	427.430.400	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.375.000	362.005.000	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.610.000	38.610.000	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.215.000	215.345.000	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	50.300.000	
3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.550.000	57.750.000	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	14.635.200	14.635.200	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	5.715.600	5.715.600	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.715.600	5.715.600	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.119.800	4.119.800	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.119.800	4.119.800	
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	4.799.800	4.799.800	
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	4.799.800	4.799.800	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.595.435.140	18.960.770.924	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13.480.287.088	18.845.623.123	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.972.649.000	16.114.825.935	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.507.638.088	2.730.797.188	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	115.148.052	115.147.801	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	115.148.052	115.147.801	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	104.487.750	104.487.750	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	16.440.300	16.440.300	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10.554.950	10.554.950	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5.885.350	5.885.350	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	62.776.550	62.776.550	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	55.859.600	55.859.600	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6.916.950	6.916.950	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.270.900	25.270.900	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	25.270.900	25.270.900	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	393.427.300	848.927.300	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	393.427.300	848.927.300	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	9.457.800	9.457.800	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	315.532.000	315.532.000	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	47.049.750	502.549.750	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	21.387.750	21.387.750	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	188.453.600	188.453.150	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	188.453.600	188.453.150	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	89.281.700	114.987.250	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	49.165.900	49.165.900	
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	50.006.000	24.300.000	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	213.457.950	813.457.900	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	213.457.950	813.457.900	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	213.457.950	813.457.900	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	926.646.194	1.841.264.196	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	926.646.194	1.841.264.196	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	926.646.194	1.841.264.196	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	881.946.744	1.796.564.746	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	881.946.744	1.796.564.746	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	717.364.294	1.631.982.296	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	164.582.450	164.582.450	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	40.309.700	40.309.700	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	40.309.700	40.309.700	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.750.000	3.750.000	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	36.559.700	36.559.700	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	4.389.750	4.389.750	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	4.389.750	4.389.750	
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4.389.750	4.389.750	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	154.482.850	101.617.950	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	154.482.850	101.617.950	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	154.482.850	101.617.950	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	154.482.850	101.617.950	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	154.482.850	101.617.950	
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	154.482.850	101.617.950	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	150.461.176.307	172.820.386.543	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	75.252.221.926	97.883.511.966	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	75.252.221.926	97.883.511.966	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Tata Pemerintahan	783.594.765	946.594.765	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	194.469.365	197.469.365	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.770.000	55.470.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.770.000	55.470.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.359.365	108.459.365	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.559.365	13.559.365	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	23.100.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.944.000	21.944.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.696.000	4.696.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.160.000	45.160.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	1.200.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.000.000	1.200.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.340.000	32.340.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.080.000	17.080.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.260.000	15.260.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	589.125.400	749.125.400	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	533.191.400	642.975.400	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	210.101.500	210.101.500	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	240.922.000	300.922.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	82.167.900	131.951.900	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	55.934.000	106.150.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	55.934.000	106.150.000	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Kesejahteraan Rakyat	23.886.262.100	39.304.431.100	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	329.786.200	329.786.200	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.878.000	103.878.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.878.000	103.878.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.578.200	123.578.200	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.932.200	39.932.200	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.960.000	36.960.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.056.000	7.056.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.630.000	24.630.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.100.000	74.100.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.100.000	2.100.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000	72.000.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.230.000	28.230.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	18.000.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.230.000	10.230.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.556.475.900	38.974.644.900	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	23.556.475.900	38.974.644.900	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	22.929.895.900	38.348.072.900	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	15.905.000	15.897.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	610.675.000	610.675.000	
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Hukum	640.480.100	1.618.480.100	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	209.350.600	260.482.100	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.382.000	58.786.500	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.382.000	58.786.500	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.025.100	140.962.100	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.609.100	41.130.100	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.620.000	26.620.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.200.000	32.334.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.900.000	6.900.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.696.000	33.978.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.900.000	31.900.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	1.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.900.000	30.900.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.043.500	28.833.500	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.800.500	15.800.500	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.243.000	13.033.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	431.129.500	1.357.998.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	431.129.500	1.357.998.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	101.250.500	192.414.500	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	296.411.000	318.523.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	33.468.000	847.060.500	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Perekonomian	2.542.189.259	3.089.833.859	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.500.259	132.500.259	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.160.000	50.160.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.160.000	50.160.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.822.700	57.410.700	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.220.700	6.220.700	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.900.000	24.900.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.585.000	5.585.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	3.061.520	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.817.000	17.643.480	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.559	939.559	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	939.559	939.559	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.578.000	23.990.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.670.000	12.050.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.908.000	11.940.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.409.689.000	2.957.333.600	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.409.689.000	2.409.689.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2.241.235.000	2.241.235.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	73.799.000	73.799.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	94.655.000	94.655.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	0	547.644.600	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	0	547.644.600	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Administrasi Pembangunan	613.181.900	638.181.900	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.049.400	164.038.900	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.370.000	54.810.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.370.000	54.810.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.159.400	77.708.900	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.483.400	7.544.900	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.247.500	36.127.500	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.526.500	3.526.500	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	1.960.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.550.000	28.550.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000	1.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	1.000.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.520.000	30.520.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.030.000	16.030.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.490.000	14.490.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	446.132.500	474.143.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	446.132.500	474.143.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	236.189.000	236.189.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	105.147.500	105.147.500	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	104.796.000	132.806.500	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	640.862.100	640.862.100	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	197.998.600	202.902.600	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.182.000	58.182.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.182.000	58.182.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.037.600	109.941.600	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.129.600	23.129.600	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.660.000	55.660.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.146.000	22.050.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.750.000	6.750.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.108.600	2.108.600	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.800.000	1.800.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308.600	308.600	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.670.400	32.670.400	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.080.400	14.080.400	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.590.000	18.590.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	442.863.500	437.959.500	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	442.863.500	437.959.500	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	116.040.000	141.800.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	66.265.000	80.101.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	260.558.500	216.058.500	
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Umum	19.836.935.698	25.369.001.698	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.836.935.698	25.369.001.698	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	120.978.000	120.978.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.978.000	120.978.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.736.561.592	6.315.533.892	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.798.600	138.798.600	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.754.492	199.754.492	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	945.350.000	1.145.334.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.618.500	322.606.800	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	102.120.000	102.120.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.064.920.000	4.406.920.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.808.830.540	2.293.613.040	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.808.830.540	2.293.613.040	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.453.500.000	4.692.705.400	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	95.700.000	95.700.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.549.000.000	2.603.000.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	286.000.000	402.805.400	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.522.800.000	1.591.200.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.071.476.566	6.332.590.366	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	302.588.000	302.588.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	639.976.800	639.976.800	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.974.025.266	3.848.265.366	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.154.886.500	1.541.760.200	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.103.705.000	1.123.705.000	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	263.705.000	263.705.000	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000	260.000.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.541.884.000	4.489.876.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.212.297.000	1.960.297.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	687.971.000	687.971.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.641.616.000	1.841.608.000	
4.01.00.0.00.01.0008	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.156.660.500	3.436.660.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.156.660.500	3.436.660.500	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.222.000	66.766.500	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.222.000	66.766.500	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.882.000	630.803.500	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.926.000	43.307.500	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.440.000	78.440.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.470.000	45.510.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.056.000	7.056.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.990.000	456.490.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.800.000	298.800.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	7.200.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.600.000	291.600.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.962.500	61.422.500	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.112.500	34.072.500	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.850.000	27.350.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.174.794.000	2.378.868.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolan	1.954.434.000	2.114.434.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	216.120.000	260.194.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.240.000	4.240.000	
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Organisasi	756.363.800	756.363.800	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	756.363.800	756.363.800	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.170.000	58.170.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.170.000	58.170.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.355.500	38.355.500	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.235.500	5.235.500	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.400.000	26.400.000	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000	4.500.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	2.220.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.200.000	77.200.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	1.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.200.000	76.200.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.820.300	19.820.300	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.080.300	13.080.300	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.740.000	6.740.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	562.818.000	562.818.000	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	163.345.000	163.345.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	127.101.000	161.361.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	212.237.000	212.237.000	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	60.135.000	25.875.000	
4.01.0.00.0.00.01.0010	Bagian Perencanaan dan Keuangan	22.395.691.704	22.083.102.144	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.395.691.704	22.083.102.144	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.217.406	216.664.707	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.674.406	51.121.707	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.543.000	165.543.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.647.322.081	21.230.162.081	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.410.883.681	21.025.883.681	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	221.412.000	186.732.000	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.423.200	2.423.200	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.603.200	15.123.200	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.850.800	21.850.800	
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.815.800	19.815.800	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.035.000	2.035.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.448.840	123.161.539	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.800.540	19.503.640	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.870.000	34.869.999	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.482.700	19.474.900	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.943.600	46.961.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.800.000	280.800.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	280.800.000	280.800.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.540.200	39.540.200	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.080.200	12.080.200	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.460.000	27.460.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	198.512.377	170.922.817	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	198.512.377	170.922.817	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	75.208.954.381	74.936.874.577	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	75.208.954.381	74.936.874.577	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	75.208.954.381	74.936.874.577	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.385.917.681	47.949.935.652	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.750.000	127.430.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.200.000	125.300.000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.550.000	2.130.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.708.133.939	5.671.590.894	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.391.873.939	5.398.572.894	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	316.260.000	273.018.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	486.050.000	486.050.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	486.050.000	486.050.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.743.474.075	3.699.455.875	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.144.900	26.144.900	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.674.725	190.771.525	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.929.750	21.929.750	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.732.000	116.732.000	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.416.700	232.291.700	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.264.000	75.264.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	94.500.000	104.550.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.216.812.000	2.931.772.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.035.661.800	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1.035.661.800	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.316.252.205	1.427.252.205	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.009.980	346.009.980	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.041.742.225	1.077.742.225	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.093.570	1.010.093.570	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.510.000	232.510.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	561.340.000	561.340.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	30.000.000	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.243.570	186.243.570	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.661.708.892	33.963.581.308	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.507.087.092	33.588.959.508	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	111.250.000	331.250.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	43.371.800	43.371.800	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	325.455.000	528.820.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	325.455.000	528.820.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	28.823.036.700	26.986.938.925	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	315.385.000	480.875.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6.075.000	6.075.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	51.110.000	66.600.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	34.200.000	34.200.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	224.000.000	374.000.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.006.265.500	4.916.402.000	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	3.496.078.000	3.371.518.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	367.500.000	557.000.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360.000.000	160.500.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	288.000.000	306.004.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	494.687.500	521.380.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.329.068.000	1.251.338.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	77.298.000	77.298.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	67.670.000	67.670.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.184.100.000	1.106.370.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	22.172.318.200	20.338.323.925	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.199.058.200	18.369.813.925	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.973.260.000	1.968.510.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	652.551.725.506	703.911.068.466	
5.01	PERENCANAAN	11.441.278.169	12.759.263.821	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.441.278.169	12.759.263.821	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.441.278.169	12.759.263.821	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.798.496.859	9.283.015.421	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.968.917	175.275.417	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.936.804	111.619.304	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.032.113	63.656.113	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.395.124.066	7.390.423.066	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.205.135.234	7.205.135.234	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	183.972.000	179.271.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.699.506	1.699.506	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.317.326	4.317.326	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.195.993	894.826.855	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.600.000	23.600.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.727.700	296.036.300	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.063.875	17.063.875	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.499.120	279.412.080	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.077.300	29.077.300	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.227.998	240.637.300	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.198.000	402.827.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.800.000	183.210.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.398.000	219.617.600	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.009.883	419.662.483	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.110.000	41.110.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.500.000	140.296.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.990.708	135.282.308	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.409.175	102.974.175	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.461.109.960	1.599.006.550	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.194.756.710	1.331.798.800	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.194.756.710	1.331.798.800	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	148.485.500	158.340.500	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	148.485.500	158.340.500	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	117.867.750	108.867.250	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	117.867.750	108.867.250	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.181.671.350	1.877.241.850	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	416.094.500	606.644.900	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	108.075.000	164.265.000	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.827.800	29.827.800	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	83.456.200	107.266.200	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.740.000	202.290.400	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	22.203.000	22.203.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	80.792.500	80.792.500	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	281.753.650	531.753.650	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	100.000.000	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	42.851.700	69.950.150	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	130.077.750	150.079.520	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	100.050.000	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	46.022.000	43.923.200	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	62.802.200	67.750.780	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	483.823.200	738.843.300	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.344.050	198.344.000	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.365.050	51.365.050	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	58.629.700	58.629.700	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.559.750	290.913.900	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	51.364.650	64.400.650	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	66.560.000	75.190.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.02	KEUANGAN	627.352.966.292	676.460.262.700	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	611.766.508.879	657.533.527.499	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	611.766.508.879	657.533.527.499	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.232.879.438	45.153.430.409	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.728.000	23.048.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.928.000	12.793.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.800.000	10.255.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.168.292.315	42.553.444.559	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.766.091.315	42.151.243.559	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	383.526.000	383.526.000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.225.000	9.225.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.450.000	9.450.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.141.980.425	1.205.183.520	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.078.400	24.081.400	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	659.804.200	730.655.295	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.488.725	9.573.725	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	316.590.000	217.710.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.086.100	20.086.100	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.985.000	58.985.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.948.000	144.092.000	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	303.495.900	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	303.495.900	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.770.000	328.590.000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.690.000	1.690.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.800.000	214.700.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.280.000	112.200.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	590.108.698	739.668.430	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.610.000	38.610.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.550.000	296.192.150	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	219.326.198	209.183.780	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.622.500	195.682.500	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	564.946.177.741	609.713.957.890	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.692.007.900	1.944.401.250	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	67.281.000	44.431.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	66.579.800	42.722.450	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	2.737.300	5.267.300	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	2.605.000	8.535.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	83.002.000	83.002.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	85.025.000	157.302.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	446.437.200	570.988.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	630.647.000	639.287.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	167.591.000	149.875.000	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	11.730.000	22.810.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12.045.000	32.778.000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	9.170.000	17.560.000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	107.157.600	169.843.500	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	352.654.500	352.654.500	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	18.948.000	18.948.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	51.354.000	51.354.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	9.354.000	9.354.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3.857.500	3.857.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.866.000	5.866.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	121.730.000	121.730.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	141.545.000	141.545.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	605.175.100	636.018.100	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.560.000	5.560.000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	6.010.000	6.010.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4.100.000	4.100.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	75.848.300	75.848.300	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	195.060.000	326.478.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	90.150.000	90.150.000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	154.210.000	53.635.000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74.236.800	74.236.800	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	562.296.340.241	606.780.884.040	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	528.389.144.950	568.579.994.950	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.174.693.664	17.568.387.463	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	16.732.501.627	20.632.501.627	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.587.451.700	2.666.139.200	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.587.451.700	2.666.139.200	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	43.155.000	152.107.500	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	42.500.000	42.500.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	40.964.650	33.839.650	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	19.949.000	66.061.500	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	286.024.000	295.173.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	301.445.000	300.282.500	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.143.226.050	844.022.050	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	258.948.450	273.948.450	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	34.920.500	34.920.500	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	255.549.350	339.399.350	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15.820.000	22.050.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.648.700	19.648.700	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	125.301.000	242.186.000	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	15.586.457.413	18.926.735.201	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	15.586.457.413	18.926.735.201	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.860.311.463	14.412.671.601	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.327.550	4.327.550	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.316.050	1.316.050	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.011.500	3.011.500	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.535.153.113	12.489.652.957	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.104.713.113	12.106.763.113	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	430.440.000	382.889.844	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	838.495.400	978.395.200	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.855.800	11.855.800	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	489.865.300	543.961.900	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.478.800	2.478.800	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.223.400	287.583.400	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.408.100	42.118.900	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.388.000	10.388.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.276.000	80.008.400	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.792.400	279.862.137	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.210.000	223.808.637	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.582.400	56.053.500	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.543.000	660.433.757	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.263.500	143.263.500	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.432.500	406.967.057	
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.847.000	110.203.200	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.726.145.950	4.514.063.600	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.726.145.950	4.514.063.600	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	145.629.800	293.165.800	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	336.899.800	362.149.800	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	348.969.900	489.231.150	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	326.088.750	831.226.850	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.509.127.850	2.467.025.250	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	59.429.850	71.264.750	
5.03	KEPEGAWAIAN	9.957.747.745	10.497.505.473	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.957.747.745	10.497.505.473	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.957.747.745	10.497.505.473	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.341.756.445	7.495.066.173	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.922.500	8.774.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.346.000	6.197.500	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.576.500	2.576.500	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.454.534.415	6.457.744.415	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.284.031.415	6.284.031.415	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.998.000	171.528.000	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.058.500	1.058.500	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.446.500	1.126.500	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	410.500	200.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	410.500	200.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.018.700	403.411.600	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	5.008.000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.513.800	69.431.700	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.480.000	1.480.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.110.000	110.110.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.013.700	83.481.700	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.906.200	4.906.200	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.995.000	128.994.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.848.340	191.153.710	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.848.340	191.153.710	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.698.590	244.226.448	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.658.590	101.811.448	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.040.000	142.415.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.323.400	189.556.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.010.000	41.010.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.643.400	99.783.400	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.670.000	48.762.600	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.615.991.300	3.002.439.300	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.529.935.100	1.530.111.100	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	37.789.000	28.757.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.149.555.900	900.151.600	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	214.082.500	432.350.500	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	128.507.700	168.852.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	684.886.400	907.203.900	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	195.350.200	196.166.800	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	157.837.600	248.973.100	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	331.698.600	462.064.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	144.280.000	123.962.500	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	93.676.000	58.228.500	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	50.604.000	65.734.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	256.889.800	441.161.800	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49.273.500	98.738.200	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	175.366.800	175.366.800	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	32.249.500	167.056.800	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.896.799.400	3.031.103.172	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.896.799.400	3.031.103.172	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.896.799.400	3.031.103.172	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.896.799.400	3.031.103.172	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	592.117.400	1.129.159.700	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	566.024.600	1.118.128.100	
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	26.092.800	11.031.600	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.304.682.000	1.901.943.472	
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	673.531.000	677.489.500	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.290.690.500	1.179.155.972	
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	340.460.500	45.298.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	902.933.900	1.162.933.300	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	902.933.900	1.162.933.300	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	902.933.900	1.162.933.300	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	902.933.900	1.162.933.300	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	155.157.500	155.157.500	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	155.157.500	155.157.500	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	192.854.500	192.854.500	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	192.854.500	192.854.500	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	333.517.500	383.517.500	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	228.318.000	278.318.000	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	105.199.500	105.199.500	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	221.404.400	431.403.800	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi	174.746.900	384.746.300	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	46.657.500	46.657.500	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	13.324.336.799	13.909.592.949	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	13.324.336.799	13.909.592.949	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	13.324.336.799	13.909.592.949	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	13.324.336.799	13.909.592.949	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.661.255.299	13.035.014.299	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	18.159.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.225.000	6.529.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.775.000	11.630.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.334.650.769	11.334.650.769	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.334.650.769	11.334.650.769	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	700.000	700.000	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	700.000	700.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.522.780	89.085.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.522.780	89.085.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.239.300	581.897.580	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.298.800	10.298.800	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.333.800	89.571.580	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	265.259.750	284.759.750	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.901.950	11.901.950	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.100.000	11.100.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.345.000	174.265.500	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	81.862.500	
6.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	81.862.500	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.503.500	532.478.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.550.000	187.550.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.953.500	344.928.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.638.950	396.181.450	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.520.000	57.225.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.928.571	131.766.071	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	25.000.000	
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	213.190.379	182.190.379	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	521.875.500	642.235.250	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	516.687.500	622.162.150	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	325.748.000	354.248.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	103.425.000	131.925.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	44.237.400	61.119.320	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	18.516.600	21.609.630	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	5.325.000	5.325.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.775.000	5.274.700	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	17.660.500	42.660.500	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	5.188.000	20.073.100	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1.620.000	8.525.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.568.000	11.548.100	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	141.206.000	232.343.400	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	8.000.000	26.017.200	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.000.000	26.017.200	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	133.206.000	206.326.200	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.000	4.250.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5.050.000	5.050.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	126.706.000	193.302.900	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	3.723.300	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	63.473.317.184	68.845.079.158	
7.01	KECAMATAN	63.473.317.184	68.845.079.158	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	2.394.595.912	2.580.595.912	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	2.394.595.912	2.580.595.912	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.320.620.162	2.506.620.162	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.164.500	4.164.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.337.500	3.337.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	827.000	827.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.994.865.012	1.996.505.012	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.921.467.512	1.921.467.512	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	73.638.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.799.500	1.399.500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.280.600	101.151.050	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.016.700	5.155.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.501.750	31.885.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.400.000	48.400.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.626.150	2.626.150	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	2.220.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.516.000	10.864.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.638.100	177.467.332	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.638.100	177.467.332	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.766.150	164.542.868	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.306.150	39.742.868	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.460.000	124.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.905.800	62.789.400	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.589.000	25.024.200	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.256.800	24.855.200	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.060.000	12.910.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000	5.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.000.000	5.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.453.000	43.453.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.453.000	43.453.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.453.000	43.453.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000	4.500.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.500.000	4.500.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.500.000	4.500.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.922.750	16.922.750	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.922.750	16.922.750	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.878.000	13.878.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.044.750	3.044.750	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.100.000	4.100.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.100.000	4.100.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.100.000	4.100.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bareng	2.673.789.685	2.939.789.685	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bareng	2.673.789.685	2.939.789.685	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.564.526.585	2.830.526.585	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.288.350	2.411.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.539.850	1.662.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	748.500	748.500	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.266.811.865	2.345.719.865	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.192.613.865	2.272.613.865	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	71.598.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	1.508.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.262.200	114.088.076	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.049.300	4.014.300	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.810.800	16.810.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.130.000	64.267.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.638.100	3.777.476	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.960.000	1.960.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.674.000	23.258.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.466.491	218.859.965	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	132.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.466.491	86.859.965	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.520.000	91.270.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.100.000	41.100.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.420.000	50.170.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.177.679	58.177.679	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.997.679	42.997.679	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.180.000	15.180.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.370.000	6.370.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.370.000	6.370.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.370.000	6.370.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.515.000	40.515.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.515.000	40.515.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.515.000	40.515.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.851.300	12.851.300	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.851.300	12.851.300	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.851.300	12.851.300	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.561.800	30.561.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.561.800	30.561.800	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.221.800	24.221.800	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.340.000	6.340.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.965.000	18.965.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.965.000	18.965.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.965.000	18.965.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Diwek	2.944.505.874	3.050.505.562	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Diwek	2.944.505.874	3.050.505.562	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.871.779.111	2.977.393.649	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.500	2.100.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.065.500	2.065.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000	35.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.527.052.874	2.597.052.874	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.419.874	2.525.419.874	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	71.598.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000	35.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.500.225	91.483.560	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.050.400	2.574.200	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.141.925	15.464.960	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.600.000	36.900.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.659.900	3.659.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.696.000	30.532.500	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.385.512	110.460.715	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.385.512	110.460.715	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.400.000	137.316.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000	39.780.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.400.000	97.536.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.340.000	38.980.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.600.000	29.600.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.740.000	9.380.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.645.000	8.020.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.645.000	8.020.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.645.000	8.020.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.801.613	33.864.113	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.801.613	33.864.113	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.801.613	33.864.113	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.190.500	5.378.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.190.500	5.378.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.190.500	5.378.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.019.650	18.579.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.019.650	18.579.800	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.384.850	13.520.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.634.800	5.059.800	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.070.000	7.270.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.070.000	7.270.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.070.000	7.270.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Gudo	2.718.298.257	3.012.208.257	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Gudo	2.718.298.257	3.012.208.257	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.632.032.457	2.932.158.457	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.379.900	10.379.900	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.109.900	6.109.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.270.000	4.270.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.335.483.707	2.445.282.357	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.261.065.957	2.368.975.957	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	73.638.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.819.750	2.668.400	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.083.350	113.200.350	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.405.000	2.405.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.431.500	23.431.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.600.000	52.200.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.366.850	13.366.850	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	1.560.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.060.000	20.237.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.235.800	223.097.700	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	146.696.300	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.235.800	76.401.400	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.309.700	102.658.150	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.309.700	35.658.150	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.000.000	67.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.540.000	37.540.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.750.000	21.750.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.790.000	15.790.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.951.200	5.951.200	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.951.200	5.951.200	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.951.200	5.951.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.254.900	40.038.900	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.254.900	40.038.900	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.254.900	40.038.900	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.179.900	6.179.900	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.179.900	6.179.900	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.179.900	6.179.900	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.379.800	22.379.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.379.800	22.379.800	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	14.279.800	14.279.800	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.100.000	8.100.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.500.000	5.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.500.000	5.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.500.000	5.500.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Jogoroto	2.480.494.149	2.693.194.149	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Jogoroto	2.480.494.149	2.693.194.149	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.383.128.599	2.595.828.599	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.670.700	8.498.700	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.220.900	3.220.900	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.449.800	5.277.800	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.152.264.379	2.178.964.379	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.084.908.379	2.111.608.379	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.810.000	66.810.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	546.000	546.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.659.100	98.240.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.752.800	5.575.600	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.327.300	39.490.100	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.270.000	39.270.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.454.000	761.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000	2.160.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.695.000	10.984.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	110.177.320	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	110.177.320	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.361.560	72.024.440	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.961.560	15.624.440	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.400.000	56.400.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.172.860	127.923.060	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.996.660	44.246.660	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	75.390.200	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.176.200	8.286.200	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.078.250	6.078.250	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.078.250	6.078.250	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.078.250	6.078.250	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.842.850	49.842.850	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.842.850	49.842.850	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.842.850	49.842.850	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.326.050	9.326.050	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.326.050	9.326.050	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.326.050	9.326.050	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.774.950	19.774.950	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.774.950	19.774.950	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.974.950	15.974.950	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.800.000	3.800.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.343.450	12.343.450	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.343.450	12.343.450	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.343.450	12.343.450	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Jombang	11.303.166.652	11.514.085.832	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Jombang	6.697.701.239	6.908.620.519	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.574.951.789	6.772.208.569	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.400.000	22.150.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.850.000	12.600.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.550.000	9.550.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.841.401.669	5.838.521.669	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.748.491.669	5.748.491.669	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.610.000	86.730.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.300.000	3.300.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.438.120	142.069.600	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.704.920	6.104.400	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.311.000	32.311.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.340.000	65.340.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.765.000	7.997.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.965.200	27.965.200	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	78.714.700	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	78.714.700	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.200.000	530.100.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	88.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463.200.000	441.300.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.512.000	160.652.600	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.262.000	46.055.700	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	89.755.100	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.250.000	24.841.800	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.014.350	13.764.350	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.014.350	13.764.350	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.014.350	13.764.350	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.317.600	47.405.100	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	45.317.600	47.405.100	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.317.600	47.405.100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.060.000	21.535.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	28.060.000	21.535.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	28.060.000	21.535.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.302.500	39.702.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.302.500	39.702.500	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	6.988.000	33.388.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.314.500	6.314.500	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.055.000	14.005.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.055.000	14.005.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.055.000	14.005.000	
7.01.0.00.0.00.06.0001	Kelurahan Jelakombo	1.160.895.632	1.160.895.532	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.972.700	128.972.700	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.920.000	43.320.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.920.000	43.320.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.654.700	48.054.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	884.000	884.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.115.300	11.117.700	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.369.400	1.763.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.040.000	29.040.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.246.000	5.249.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.020.000	22.020.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.100.000	8.100.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.920.000	13.920.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.378.000	15.578.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.638.000	8.638.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.740.000	6.940.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.031.922.932	1.031.922.832	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.031.922.932	1.031.922.832	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.941.000	350.941.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	680.981.932	680.981.832	
7.01.0.00.0.00.06.0002	Kelurahan Jombatan	1.135.689.000	1.135.689.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.394.200	172.000.900	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.920.000	43.320.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.920.000	43.320.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.874.200	64.588.550	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	971.100	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.486.200	24.705.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	1.811.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.040.000	29.040.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.348.000	8.060.050	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	33.637.500	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	33.637.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.600.000	21.750.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	16.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	4.950.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	8.704.850	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	6.674.850	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	2.030.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.020.294.800	963.688.100	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	594.828.800	452.280.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	57.005.700	52.968.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	417.964.500	234.258.700	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119.858.600	165.053.600	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	425.466.000	511.407.300	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	350.452.000	350.452.000	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	75.014.000	160.955.300	
7.01.0.00.0.00.06.0003	Kelurahan Kaliwungu	1.145.286.617	1.145.286.617	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.969.200	120.969.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.920.000	43.320.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.920.000	43.320.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.441.800	33.151.800	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.005.100	4.785.100	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	941.700	941.700	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.040.000	26.620.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	455.000	805.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.720.000	22.030.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.760.000	12.130.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.960.000	9.900.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.887.400	22.467.400	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000	1.350.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.720.000	3.450.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.667.400	17.667.400	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.024.317.417	1.024.317.417	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	588.178.667	627.298.667	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	352.941.000	352.941.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	235.237.667	274.357.667	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	352.245.750	331.125.750	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	302.220.000	281.100.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	50.025.750	50.025.750	
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	83.893.000	65.893.000	
7.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	83.893.000	65.893.000	
7.01.0.00.0.00.06.0004	Kelurahan Kepanjen	1.163.594.164	1.163.594.164	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.801.700	129.801.700	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.920.000	43.320.000	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.920.000	43.320.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.811.300	48.545.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.406.100	3.406.100	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.263.000	9.526.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.552.200	3.023.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.040.000	29.040.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.550.000	3.550.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.220.000	29.220.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.700.000	17.700.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.520.000	11.520.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.850.400	8.716.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.260.400	4.816.600	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.590.000	3.900.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.033.792.464	1.033.792.464	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.033.792.464	1.033.792.464	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	352.908.607	352.908.607	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	680.883.857	680.883.857	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Kabuh	2.674.385.231	2.960.385.231	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Kabuh	2.674.385.231	2.960.385.231	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.560.973.481	2.847.173.481	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.429.150	2.429.150	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.490.400	1.490.400	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	938.750	938.750	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.275.061.767	2.270.441.767	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.202.304.067	2.202.304.067	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	66.978.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.159.700	1.159.700	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.984.050	91.050.050	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.123.100	4.123.100	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.531.000	18.029.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.200.000	46.200.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.129.950	5.129.950	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	2.220.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.780.000	15.348.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.870.300	96.120.900	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.870.300	96.120.900	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.456.614	116.460.014	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.179.414	29.342.814	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.277.200	87.117.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.171.600	270.671.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.030.000	31.530.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.461.600	236.461.600	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.680.000	2.680.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.641.350	4.641.350	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.641.350	4.641.350	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.641.350	4.641.350	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.749.000	51.549.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.749.000	51.549.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.749.000	51.549.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.013.400	10.013.400	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.013.400	10.013.400	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.013.400	10.013.400	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.833.000	24.833.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.833.000	24.833.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.833.000	24.833.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.175.000	22.175.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.175.000	22.175.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.175.000	22.175.000	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kesamben	2.585.610.062	2.771.610.062	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kesamben	2.585.610.062	2.771.610.062	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.503.130.062	2.669.605.062	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.418.600	2.418.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.608.000	1.608.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	810.600	810.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.207.509.014	2.209.549.014	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.136.411.014	2.136.411.014	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.398.000	72.438.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.163.500	90.221.600	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.678.000	3.678.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.621.500	17.679.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.710.000	39.710.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.415.000	3.415.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.387.000	23.387.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.407.948	176.102.948	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.407.948	176.102.948	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.200.000	118.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	39.600.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.200.000	79.200.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.431.000	72.512.900	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.450.000	32.450.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.871.000	29.952.900	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.110.000	10.110.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.630.000	13.017.500	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.630.000	13.017.500	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.630.000	13.017.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.811.000	42.461.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.811.000	42.461.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.811.000	42.461.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.460.000	10.635.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.460.000	10.635.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.460.000	10.635.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.139.000	22.901.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.139.000	22.901.500	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.234.000	13.234.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.905.000	9.667.500	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.440.000	12.990.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.440.000	12.990.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.440.000	12.990.000	
7.01.00.0.00.09.0000	Kecamatan Kudu	2.605.047.143	2.884.214.127	
7.01.00.0.00.09.0000	Kecamatan Kudu	2.605.047.143	2.884.214.127	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.521.994.143	2.801.161.127	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.568.500	5.568.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.693.500	4.693.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	875.000	875.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.221.908.424	2.315.075.408	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.610.424	2.242.777.408	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	71.598.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.090.750	100.090.750	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.900.750	4.900.750	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.730.000	13.730.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.080.000	58.080.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.270.000	3.270.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.758.000	17.758.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.478.319	93.784.823	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.478.319	93.784.823	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.545.150	125.825.150	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.420.000	19.620.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.125.150	106.205.150	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.403.000	160.816.496	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.484.000	28.897.496	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.769.000	121.769.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	10.150.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.242.000	6.242.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.242.000	6.242.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.242.000	6.242.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.742.000	34.742.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.742.000	34.742.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.742.000	34.742.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.543.000	11.543.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.543.000	11.543.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.543.000	11.543.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.514.000	20.514.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.514.000	20.514.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11.608.000	11.608.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.906.000	8.906.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.012.000	10.012.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.012.000	10.012.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.012.000	10.012.000	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Megaluh	2.810.614.626	2.996.614.626	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Megaluh	2.810.614.626	2.996.614.626	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.754.689.776	2.944.954.776	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.075.500	1.740.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	655.500	655.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	420.000	1.085.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.355.562.458	2.355.562.458	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.283.614.458	2.283.614.458	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	71.598.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	350.000	350.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.435.000	101.435.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.152.500	3.152.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.045.800	15.045.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.400.000	48.400.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.826.700	3.826.700	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.610.000	28.610.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.276.820	200.276.820	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.276.820	200.276.820	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.130.640	117.410.640	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.057.440	31.057.440	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.073.200	86.353.200	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.209.358	168.529.358	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.678.758	51.998.758	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.930.600	105.930.600	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.600.000	10.600.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.972.500	2.372.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.972.500	2.372.500	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.972.500	2.372.500	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.007.500	34.807.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.007.500	34.807.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.007.500	34.807.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.831.000	1.566.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.831.000	1.566.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.831.000	1.566.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.775.850	11.175.850	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.775.850	11.175.850	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11.775.850	11.175.850	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.338.000	1.738.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.338.000	1.738.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.338.000	1.738.000	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Mojoagung	3.036.207.424	3.307.207.424	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Mojoagung	3.036.207.424	3.307.207.424	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.946.355.224	3.188.430.224	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.918.200	7.918.200	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.868.200	5.868.200	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.050.000	2.050.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.609.978.274	2.609.978.274	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.535.355.274	2.535.355.274	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	71.598.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.025.000	3.025.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.283.600	103.341.600	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	967.300	967.300	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.769.500	15.769.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.750.000	50.820.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.652.800	6.652.800	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.792.000	26.780.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.115.026	96.335.985	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.115.026	96.335.985	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.227.124	100.123.165	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.427.124	25.723.165	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.800.000	74.400.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.833.000	270.733.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.348.000	37.248.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.335.000	219.335.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.150.000	14.150.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.340.200	5.340.200	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.340.200	5.340.200	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.340.200	5.340.200	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.320.100	43.120.100	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.320.100	43.120.100	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.320.100	43.120.100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.460.000	5.460.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.460.000	5.460.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.460.000	5.460.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.233.800	58.358.800	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.233.800	58.358.800	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.032.400	53.157.400	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.201.400	5.201.400	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.498.100	6.498.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.498.100	6.498.100	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.498.100	6.498.100	
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Mojowarno	2.581.609.299	2.767.609.299	
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Mojowarno	2.581.609.299	2.767.609.299	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.456.005.299	2.642.005.299	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.356.000	2.656.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.656.000	1.956.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	700.000	700.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.172.193.299	2.172.193.299	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.099.895.299	2.099.895.299	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	71.598.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.731.800	85.590.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.341.000	2.341.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.184.000	12.404.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.400.000	43.560.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.632.800	5.032.800	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.822.000	19.900.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.162.929	207.489.529	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.162.929	207.489.529	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.233.671	91.112.271	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.500.000	24.480.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.733.671	66.632.271	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.327.600	82.963.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.050.000	38.050.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.197.600	34.193.500	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.080.000	10.720.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.750.000	5.750.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.750.000	5.750.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.750.000	5.750.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.772.000	56.772.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.772.000	56.772.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.772.000	56.772.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.675.000	13.675.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.675.000	13.675.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.675.000	13.675.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.832.000	31.832.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.832.000	31.832.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.257.000	26.257.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.575.000	5.575.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.575.000	17.575.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.575.000	17.575.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.575.000	17.575.000	
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Ngoro	2.474.513.364	2.745.513.364	
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Ngoro	2.474.513.364	2.745.513.364	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.365.704.364	2.611.704.364	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.265.000	6.265.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.390.000	5.390.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	875.000	875.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.122.511.364	2.122.511.364	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.049.513.364	2.049.513.364	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	71.598.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000	1.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.770.800	73.936.200	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.003.000	15.458.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.890.000	28.600.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.243.800	7.243.800	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	2.220.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.414.000	17.414.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.531.250	80.865.850	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.531.250	80.865.850	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.496.950	67.996.950	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.190.000	20.190.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.306.950	47.806.950	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.129.000	260.129.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.104.000	30.104.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.145.000	219.145.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.880.000	10.880.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.225.000	6.225.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.225.000	6.225.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.225.000	6.225.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.484.000	50.484.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.484.000	50.484.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.484.000	50.484.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.975.000	10.975.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.975.000	10.975.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.975.000	10.975.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.450.000	55.450.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.450.000	55.450.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.400.000	49.400.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.050.000	6.050.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.675.000	10.675.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.675.000	10.675.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.675.000	10.675.000	
7.01.00.0.00.14.0000	Kecamatan Ngusikan	2.561.540.984	2.788.475.049	
7.01.00.0.00.14.0000	Kecamatan Ngusikan	2.561.540.984	2.788.475.049	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.502.822.884	2.729.756.949	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.929.500	21.169.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.109.500	7.109.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.820.000	14.060.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.214.142.984	2.256.437.049	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.141.144.984	2.182.079.049	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.598.000	72.958.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000	1.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.408.100	108.408.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.263.100	23.263.100	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.130.000	53.130.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.989.000	3.989.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.674.000	22.674.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.877.222	175.370.022	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.877.222	175.370.022	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.380.000	102.544.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.480.000	24.480.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.900.000	78.064.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.085.078	65.828.278	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.879.078	34.081.844	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.926.000	23.466.434	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.280.000	8.280.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.940.000	2.940.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.940.000	2.940.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.940.000	2.940.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.824.500	30.824.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.824.500	30.824.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.824.500	30.824.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.649.000	4.649.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.649.000	4.649.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.649.000	4.649.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.775.100	16.775.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.775.100	16.775.100	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.025.100	15.025.100	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.750.000	1.750.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.529.500	3.529.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.529.500	3.529.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.529.500	3.529.500	
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Perak	2.851.997.105	3.118.952.552	
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Perak	2.851.997.105	3.118.952.552	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.764.081.755	3.025.962.202	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.666.500	6.001.500	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.151.500	4.451.500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.515.000	1.550.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.421.899.085	2.509.137.532	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.373.601.485	2.454.556.932	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.672.600	53.530.600	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.625.000	1.050.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.766.250	110.466.750	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.036.000	19.236.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.400.000	48.400.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.990.250	8.990.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.988.000	31.488.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.546.250	121.286.350	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.546.250	121.286.350	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.600.000	25.600.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.600.000	25.600.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.603.670	253.470.070	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.037.200	56.268.200	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.326.470	180.961.870	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.240.000	16.240.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.426.250	6.526.250	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.426.250	6.526.250	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.426.250	6.526.250	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.328.500	44.928.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.328.500	44.928.500	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40.328.500	44.928.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.844.000	9.314.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.844.000	9.314.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.844.000	9.314.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.450.000	19.155.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.450.000	19.155.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8.487.500	16.510.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.962.500	2.645.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.866.600	13.066.600	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.866.600	13.066.600	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.866.600	13.066.600	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Peterongan	2.303.319.267	2.489.319.267	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Peterongan	2.303.319.267	2.489.319.267	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.239.581.067	2.425.581.067	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.023.000	4.023.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.055.000	1.055.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.968.000	2.968.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.844.920.312	1.844.920.312	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.778.960.312	1.778.960.312	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.610.000	65.610.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	350.000	350.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.451.677	80.451.677	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.974.300	1.974.300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.660.000	55.660.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.491.377	1.491.377	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.974.000	18.974.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.245.592	99.717.792	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.245.592	99.717.792	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.574.576	225.424.346	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.601.920	47.950.596	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.096.825	16.096.825	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.875.831	161.376.925	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.365.910	171.043.940	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.041.310	22.041.310	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.174.600	138.852.630	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	10.150.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.785.900	2.785.900	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.785.900	2.785.900	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.785.900	2.785.900	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.588.200	34.588.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.588.200	34.588.200	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.588.200	34.588.200	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	781.600	781.600	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	781.600	781.600	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	781.600	781.600	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.162.500	13.162.500	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.162.500	13.162.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10.110.000	10.110.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.052.500	3.052.500	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.420.000	12.420.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.420.000	12.420.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.420.000	12.420.000	
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Plandaan	2.270.858.617	2.740.958.617	
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Plandaan	2.270.858.617	2.740.958.617	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.182.181.967	2.650.169.467	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.954.300	2.954.300	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.803.150	2.803.150	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	151.150	151.150	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.900.672.117	1.896.254.617	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.833.467.217	1.833.467.217	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.810.000	62.392.500	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	394.900	394.900	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.561.300	97.448.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.764.400	3.134.600	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.474.300	17.181.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.890.000	42.845.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.232.600	3.232.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	2.352.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.848.000	28.702.800	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.500.000	484.976.200	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	164.290.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	199.954.700	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.500.000	120.731.500	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.900.360	128.494.160	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.200.000	25.200.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.700.360	103.294.160	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.593.890	40.041.290	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.923.890	33.951.290	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.670.000	6.090.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.060.750	4.060.750	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.060.750	4.060.750	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.060.750	4.060.750	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.643.200	45.830.700	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.643.200	45.830.700	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.643.200	45.830.700	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.319.650	8.319.650	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.319.650	8.319.650	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.319.650	8.319.650	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.247.950	30.172.950	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.247.950	30.172.950	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.556.850	27.481.850	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.691.100	2.691.100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.405.100	2.405.100	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.405.100	2.405.100	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.405.100	2.405.100	
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Ploso	2.573.360.109	3.086.360.109	
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Ploso	2.573.360.109	3.086.360.109	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.491.551.009	2.976.398.509	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.063.000	2.063.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.549.000	1.549.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	514.000	514.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.416.222	2.240.416.222	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.121.027.322	2.173.027.322	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.810.000	66.810.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	578.900	578.900	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.591.100	125.131.100	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.762.500	5.762.500	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.779.100	21.319.100	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.820.000	50.820.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.082.500	7.082.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	2.220.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.927.000	37.927.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	31.640.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	31.640.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.483.308	137.150.808	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.600.308	35.267.808	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.883.000	101.883.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.997.379	439.997.379	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.247.379	34.247.379	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	400.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.750.000	5.750.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.680.000	3.680.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.680.000	3.680.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.680.000	3.680.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.912.000	43.244.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.912.000	43.244.500	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.912.000	43.244.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.435.000	3.435.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.435.000	3.435.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.435.000	3.435.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.837.100	56.657.100	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	27.837.100	56.657.100	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.557.100	54.377.100	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.280.000	2.280.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.945.000	2.945.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.945.000	2.945.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.945.000	2.945.000	
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Sumobito	2.669.333.622	2.855.333.622	
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Sumobito	2.669.333.622	2.855.333.622	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.563.480.022	2.762.580.022	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.380.000	5.550.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.220.000	3.520.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.160.000	2.030.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.226.149.692	2.233.048.192	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.162.389.692	2.162.389.692	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.400.000	69.298.500	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.360.000	1.360.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.545.330	86.153.414	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.029.130	5.029.130	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.837.000	21.974.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.820.000	40.820.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.529.200	3.631.884	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.352.000	1.960.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.978.000	12.738.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.584.000	141.040.896	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.584.000	141.040.896	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.600.000	73.800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.600.000	49.800.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.221.000	222.987.520	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.838.000	46.070.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.973.000	165.647.520	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.410.000	11.270.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.875.000	16.875.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.875.000	16.875.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.875.000	16.875.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.501.800	39.201.800	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.501.800	39.201.800	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.501.800	39.201.800	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.092.000	10.892.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.092.000	10.892.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.092.000	10.892.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.209.800	14.609.800	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.209.800	14.609.800	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.809.800	13.809.800	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.400.000	800.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.175.000	11.175.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.175.000	11.175.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.175.000	11.175.000	
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Tembelang	2.667.252.535	2.853.252.535	
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Tembelang	2.667.252.535	2.853.252.535	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.591.403.535	2.755.553.535	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.267.600	5.267.600	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.808.600	3.808.600	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.459.000	1.459.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.262.648.835	2.266.048.835	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.195.154.835	2.195.154.835	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.810.000	70.210.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	684.000	684.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.467.250	110.527.250	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.291.300	3.291.300	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.433.350	20.433.350	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.400.000	48.400.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.024.600	3.024.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000	2.220.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.098.000	33.158.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.601.800	64.421.800	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.601.800	64.421.800	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.202.000	163.752.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.352.000	43.152.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.850.000	120.600.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.216.050	145.536.050	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.256.120	32.626.120	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.213.930	105.163.930	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.746.000	7.746.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.100.000	2.100.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.100.000	2.100.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.100.000	2.100.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.594.000	40.594.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.594.000	40.594.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.594.000	40.594.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.000	28.850.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.000.000	28.850.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.000.000	28.850.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.655.000	22.655.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.655.000	22.655.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	18.855.000	18.855.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.800.000	3.800.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.500.000	3.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.500.000	3.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.000	3.500.000	
7.01.7.01.7.01.21.0000	Kecamatan Wonosalam	2.292.817.267	2.688.893.877	
7.01.7.01.7.01.21.0000	Kecamatan Wonosalam	2.292.817.267	2.688.893.877	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.187.629.767	2.583.706.377	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.725.000	4.725.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.025.000	4.025.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	700.000	700.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.875.445.267	1.884.721.877	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.811.545.267	1.821.621.877	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.400.000	62.400.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.525.700	91.549.700	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.081.100	4.520.600	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.726.600	16.726.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.200.000	36.960.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.616.000	7.640.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.502.000	23.302.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.022.761	240.321.081	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	43.445.400	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	45.098.146	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.022.761	151.777.535	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.900.000	99.900.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	10.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.100.000	89.100.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.011.039	262.488.719	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.576.039	58.576.039	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.435.000	193.202.680	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	10.710.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.675.000	4.675.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.675.000	4.675.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.675.000	4.675.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.762.500	51.762.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.762.500	51.762.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.762.500	51.762.500	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.350.000	13.350.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.350.000	13.350.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.350.000	13.350.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.900.000	25.900.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.900.000	25.900.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17.600.000	17.600.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.300.000	8.300.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.500.000	9.500.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.500.000	9.500.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.500.000	9.500.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	15.953.170.438	52.984.031.162	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.953.170.438	52.984.031.162	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.953.170.438	52.984.031.162	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.953.170.438	52.984.031.162	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.996.275.938	4.212.292.352	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.646.350	10.646.350	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.645.750	8.645.750	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.600	2.000.600	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.505.505.478	3.510.683.378	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.249.329.658	3.249.329.658	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	249.659.120	256.706.420	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.777.950	3.777.950	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.738.750	869.350	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.379.300	224.633.075	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.929.700	2.157.148	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.527.550	29.750.777	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.326.000	58.272.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.669.050	18.898.650	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.642.000	6.642.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.285.000	108.912.500	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.235.208	151.365.314	
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.235.208	151.365.314	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.400.000	44.850.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	44.850.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.109.602	270.114.235	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.491.022	52.549.698	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.218.580	201.213.037	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.400.000	16.351.500	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	492.043.000	541.586.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	492.043.000	541.586.000	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.417.500	692.500	
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.417.500	1.567.500	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	353.592.000	403.710.000	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	134.406.000	134.406.000	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.210.000	1.210.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.669.936.950	37.860.693.510	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.669.936.950	37.860.693.510	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.599.850	1.599.850	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.775.900	1.775.900	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	5.604.125.850	37.792.257.410	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	41.516.050	44.141.050	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.919.300	20.919.300	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.387.442.200	8.744.542.200	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.387.442.200	8.744.542.200	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12.685.000	12.685.000	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	113.991.300	83.991.300	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.231.742.900	8.618.842.900	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.023.000	29.023.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	454.196.500	604.196.500	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	454.196.500	604.196.500	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.417.500	1.105.000	
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.417.500	1.717.500	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	337.277.000	487.289.500	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	112.867.500	112.867.500	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.217.000	1.217.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	953.275.850	1.020.720.600	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	953.275.850	1.020.720.600	
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.577.050	1.925.000	

TABEL 4.1 PERUBAHAN PPAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN		
		SEBELUM	SESUDAH	KET
1	2	3	4	5
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	109.898.500	108.635.000	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	462.534.800	528.372.100	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	63.544.200	67.942.200	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	23.274.750	22.399.750	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	291.446.550	291.446.550	

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dengan mendasarkan pada perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah yang telah disampaikan pada dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD, rencana perubahan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 baik Pembiayaan Penerimaan maupun Pembiayaan Pengeluaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Perubahan PPAS Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

KODE	PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5=4-3
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	212.515.046.776	369.090.645.875	156.575.599.099
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	232.515.046.776	389.090.645.875	156.575.599.099
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000	20.000.000.000	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000	40.000.000.000	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	192.515.046.776	349.090.645.875	156.575.599.099

Sumber : BPKAD Kab. Jombang, Tahun 2023

BAB VI PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

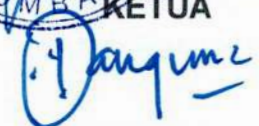
Jombang, 31 Juli 2023


 **BUPATI JOMBANG**
selaku
PIHAK PERTAMA


H. MUNDJIDAH WAHAB

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**
selaku
PIHAK KEDUA


H. MAS'UD ZUREMI
KETUA


DONNY ANGGUN, S.Sos
WAKIL KETUA


FARID AL FARISI
WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA